



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

Info Indonesia

MINGGU IV SEPTEMBER 2023

Harga @ Rp 20.000,-



KEJAKSAAN BUKAN ALAT POLITIK

TIDAK NETRAL! ASN KENA
SANKSI BERAT

JURUS DEWA DI TAHUN POLITIK

PILKADA DIMAJUKAN TITO
MAKIN BERKUASA

KAESANG JADI KETUA UMUM PSI

NASDEM HARUS JUARA
DI PEMILU 2024

KPU LEMPAR MASALAH KAMPANYE KE BAWASLU

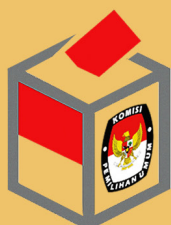
GANJAR- PRABOWO BERSATU UNTUK SATU PUTARAN

DEMOKRAT GABUNG PRABOWO, JARGON PERUBAHAN SUDAH TAMAT

SOSOK 3 CAPRES DI MATA
KADER DAERAH

SUARA KOMUNITAS UNTUK PRESIDEN KEDELAPAN

MENDENGAR ASPIRASI
DEMOKRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



Road to
Election
2024



“Berdasarkan survei hari ini, Ganjar dan Prabowo kan kejar-kejaran di nomor 1 dan 2. Jadi bayangkan kalau nomor 1 dan 2 gabung, tentu suaranya akan sangat-sangat besar”

M Qodari



Gagasan

Pesta demokrasi yang akan digelar besar-besaran pada Februari 2024 semakin dekat. Para calon presiden pun sudah muncul dan nama-nama calon wakil presiden juga semakin terungkap.

Ketiga capres 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mulai membo-corkan beberapa program kerja mereka. Namun begitu, belum ada sambutan positif untuk janji kampanye yang dilontarkan ketiga capres itu.

Ganjar menjanjikan untuk menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta. Angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan seperti mimpi di siang bolong. APBN disebut tak akan kuat untuk membiayai gaji guru sebesar itu.

Prabowo berjanji melanjutkan program Presiden Jokowi yang pro rakyat dan memberikan makan gratis kepada murid sekolah dan ibu hamil. Namun, janji itu disebut hanya solusi jangka pendek. Prabowo seharusnya lebih berfokus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas untuk membantu orang miskin memperoleh pekerjaan.

Sementara, Anies Baswedan, dinilai belum memaparkan secara konkret program kerja yang ingin dijalankan, malah selama ini lebih banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi. Anies yang mengusung tema perubahan harus menawarkan solusi untuk membenahi pemerataan pembangunan di era Jokowi.

Adu gagasan yang ditawarkan para bakal capres mendapatkan dukungan banyak kalangan, termasuk di lingkungan kampus. Apalagi, sosialisasi di kampus pun tidak dilarang. Meski ada pula kampus yang melarang adanya kegiatan politik.

Info Indonesia edisi kali ini akan membahas sejumlah isu terkait Pilpres 2024, terutama terkait adu gagasan dari ketiga capres. Banyak pihak mengkritik, meski ada pula yang mengapresiasi, gagasan dan program kerja yang akan dijalankan jika terpilih sebagai kepala negara berikutnya pengganti Jokowi.

Perkembangan terkait pemilihan kepala daerah juga semakin dinamis menyusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang resmi menyiapkan Perppu Pilkada agar bisa dipercepat dari November menjadi September 2024.

Soal Pilkada ini, sejumlah kandidat di daerah juga terus memunculkan namanya agar semakin dikenal publik dan bisa mendapatkan dukungan menjadi orang nomor satu di daerahnya.

Dari sisi partai, Demokrat yang telah hengkang dari Koalisi Perubahan akhirnya melabuhkan pilihannya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan lebih mendukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo. Demokrat juga lebih rasional dengan tidak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, kini dikabarkan menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, Kaesang disebut-sebut bakal menduduki posisi sebagai ketua umum menggantikan Giring Ganesha.

Masih banyak isu lain yang tersaji dalam Info Indonesia edisi IV September 2023 yang bisa menjadi referensi untuk Pemilu 2024. Selamat membaca!!!



info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzanl Khan PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina

Erlina REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto,

M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles TATA LETAK: Sujatmiko MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah PENGEMBANGAN BISNIS: M. Iqbal, Zul Fahmi ADMINISTRASI:

Ega Tri Gustina DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 TELP 021-

791 96781 FAX 021-791 96786 PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 TELP : 0711-7442344



“Justru pertanyaan kritisnya adalah, apakah nanti Anies bisa menjadi pemimpin yang efektif dan efisiensi atau malah memberi ruang semuanya terhadap korupsi”

Hari Purwanto

ANIES DOYAN KRITIK, LEBIH SUKA CARI AMAN

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan hak kebebasan berpendapat menurun selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Anies itu disampaikan pada acara bertajuk “3 Capres Bicara Gagasan” yang digelar Narasi di lapangan Pancasila, Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 19 September 2023.

Dalam acara itu, Najwa Shihab bekerja sama dengan UGM mengundang tiga bakal capres yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Terdapat tujuh tema pertanyaan yang diunggah Najwa Shihab dalam kegiatan tersebut. Ketujuh tema itu yakni korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup, adaptasi digital, dan kebhinekaan.

Menurut Anies, jika diukur berdasarkan skala 1-10, skor kebebasan berpendapat di Indonesia masih di angka 5-6. Sehingga, kata dia, kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah.

“Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi,” ucapnya.

Dia mengatakan, kebebasan berpendapat di Indonesia masih jauh dari harapan. Ia pun mencontohkan bagaimana dosen tidak lepas dari kriminalisasi.

“Kita harus memberikan apalagi di kampus ruang kebebasan berekspresi mengkritik pemerintah itu sah dan itu boleh dan apalagi dilakukan oleh kampus-kampus,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, membantah pernyataan Anies mengenai kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran. Menurut Hari, saat ini Presiden Jokowi masih mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat warga sipil.

“Kebebasan berpendapat saat ini sudah jauh mengalami kemajuan, apalagi jika dibandingkan dengan zaman orde baru,” ujar Hari, Jumat, 21 September 2023.

Hari menilai, kebebasan berpendapat pada era Presiden Jokowi saat ini cukup mengalami kemajuan lantaran tidak otoriter seperti zaman orde baru. “Sederhana saja, jika tidak fitnah, bukan ujaran kebencian, apakah ada orang yang salah dibui? Atau apakah ada kasus orang hilang karena mengkritik pemerintah?” tanya Hari.

Pernyataan Anies soal kebebasan berpendapat itu muncul lantaran Najwa Shihab melempar pertanyaan secara langsung perihal tanggapannya mengenai situasi politik, khususnya terkait pemerintahan Jokowi

dalam memberikan hak demokrasi pada masyarakat.

Anies menyebut, situasi hari ini, hak kebebasan berpendapat di Indonesia sejauh ini cenderung lemah. Hal itu bisa dilihat dalam komentar di media sosial yang mengarah pada kritik pemerintah rata-rata banyak yang mengistilahkan Indonesia sebagai negeri wakanda.

“Selagi penyebutan negara Indonesia masih menggunakan istilah negeri wakanda, maka skor kebebasan berpendapat di Indonesia cukup rendah,” ujar Anies.

Menanggapi hal itu, Hari menyebut penegakan hukum pidana secara langsung harus dibedakan dengan penegakan hukum di bidang ITE asalkan tidak berbicara hoaks yang merugikan orang lain lantaran setiap warga negara harus mematuhi

norma hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum di bidang ITE jangan lantas diartikan sebagai pembungkaman. Sebab, penegakan hukum itu pun

menjadi bagian dari kewajiban negara menjaga kepentingan warga negaranya,” ujar Hari.

Di sisi lain, Hari menilai, salah satu ukuran penegakan hak kebebasan berpendapat publik yang masih dipertahankan Presiden Jokowi yakni masih terasa di tengah era kemajuan zaman dengan berbasis

informasi teknologi saat ini belum ada satu kasus platform medsos yang dibredel.

“Salah satu parameter kebebasan berpendapat sebenarnya bisa dilihat dari kehidupan medsos, apakah ada platform medsos yang dibredel?” ungkap Hari.

Selain hak kebebasan berpendapat, Anies juga menyoroti konflik pengusuran yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Anies mengungkapkan pandangannya mengenai konflik itu.

Hari menyoroti pengalaman Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga mengalami sejumlah konflik agraria, yakni pengusuran warga atas kepentingan pembangunan. Menurut Hari, Anies juga pernah mengalami situasi yang sama saat menjabat sebagai Gubernur DKI yakni mencari jalan aman dalam menghadapi konflik agraria tersebut.

“Dia bahkan cenderung ambil sikap aman. Salah satunya dengan tidak merelokasi warga di bantaran Ciliwung untuk program naturalisasi. Akibatnya, sejumlah proyek untuk rakyat terhenti,” tutur Hari.

Hari menambahkan, dalam menghadapi situasi sebagai pemimpin negara, pastinya akan selalu dihadapi dengan kondisi masifnya rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Juga dihadapkan dengan penggunaan lahan masyarakat yang berbentuk ketidaksepakatan.

“Justru pertanyaan kritisnya adalah, apakah nanti Anies bisa menjadi pemimpin yang efektif dan efisiensi atau malah memberi ruang semuanya terhadap korupsi,” tegas Hari.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry

Mendrofa, menilai, pernyataan Anies yang mengkritik hak kebebasan berpendapat dan konflik agraria di Pulau Rempang belum tentu mudah untuk diaplikasikan.

Sebab, persoalan hak kebebasan berpendapat dan konflik agraria itu merupakan masalah yang kerap kali timbul dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin yang menakhodai Indonesia.

“Saya pun ragu, karena jelas bahwa persoalan ini juga jadi tantangan tersendiri. saya rasa ya setiap pemimpin kedepannya juga nanti akan menghadapi tantangan-tantangan sendiri termasuk soal realisasi janji kampanye,” ungkap Hery.

Kendati demikian, Hery menilai, terkait pernyataan Anies mengenai kondisi kebebasan berpendapat yang skornya semakin menurun di era pemerintahan Jokowi merupakan realitas objektif sebagai manifestasi evaluasi yang harus didengar oleh pemerintah.

“Ini realita dan evaluasi juga karena selama pemerintahan Jokowi aspek demokrasi jadi perhatian khusus dan tentunya mempengaruhi stabilitas politik,” tegas Hery.

Hery menilai isu konflik agraria dan kebebasan berpendapat merupakan strategi paling jitu yang acap kali dilakukan oleh sosok bakal calon pemimpin dalam rangka meraup simpati masyarakat, khususnya segmen elektoral suara jelang kontestasi Pemilu.

“Nah, ini kan posisi politik yang harus diambil Anies dalam konteks pilpres karena tujuannya adalah segmen elektoral, maka isu ini mesti dimainkan” tutur Hery.

Hery menambahkan, terhadap konflik agraria yang belakangan ini masif terjadi antara rakyat dengan pemerintah merupakan implikasi dari buruknya komunikasi yang dibangun pemangku kebijakan dalam membangun pendekatan pada masyarakat.

“Saya rasa pendekatan sosiologis terhadap beberapa persoalan konflik di Indonesia cenderung buruk juga, bukan hanya soal rempang, ada wadas, ada juga Papua, ini kan bukti bahwa pemerintah belum optimal,” tandas Hery. ●RDO



GAJI GURU RP30 JUTA JANJI GANJAR TAK MASUK AKAL

Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menjanjikan akan menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta jika terpilih sebagai presiden di 2024. Angka tersebut didapatkan ketika dirinya meminta kepada ahli pendidikan dan keuangan untuk melakukan perhitungan terhadap gaji guru yang layak untuk diberikan.

“Kalau kemudian sekian tahun bisa Rp20 juta, bisa (naik) Rp30 juta, Rp 30 juta (sudah layak). Saya kemarin minta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan keuangan, hitung dong,” kata Ganjar, Jumat, 8 September 2023.

Setelah melakukan perhitungan terhadap gaji guru, ditemukan bahwa untuk yang baru mengajar kisaran gajinya sebesar Rp10 juta.

“Saya minta hitung, bisa mulai dari berapa (gaji guru). Saya bayangkan kalau guru kita masuk pertama, masih baru gajinya Rp 10 juta,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesejahteraan guru. Salah satu yang dilakukan adalah memberikan sertifikasi terhadap guru.

“Sebenarnya pemerintah kita sudah mulai melakukan standarisasi sertifikasi dan itu jelas sangat membantu,” jelas Ganjar.

Dengan adanya indikator-indikator yang dapat memberikan kesejahteraan tersebut, maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin bahwa gaji guru itu bisa menyentuh Rp30 juta. “Yang saya bayangkan tuh begini, bisa enggak ya gaji guru itu minimal Rp 30 juta,” kata Ganjar.

Kendati begitu, Ganjar juga meminta kepada ahli pendidikan dan keuangan untuk menghitung jika gaji guru itu seminimal mungkin UMK. Dirinya juga bertanya langsung kepada guru yang sudah mengabdikan sekian tahun dan gajinya sesuai dengan UMK. Dia pun kaget dengan gaji besaran UMK, guru tersebut bisa membangun usaha.

“Saya tanya, sekarang sudah bisa punya usaha, menata kredit rumah, ini lompatan tinggi,” ucap Ganjar.

Direktur Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengkritisi keras janji Ganjar Pranowo yang menginginkan gaji guru sebesar Rp30 juta.

Menurutnya, janji mantan Gubernur Jawa Tengah itu sangat tidak realistis dan hanya ingin mencari simpati masyarakat. “Janjinya Ganjar soal

gaji guru Rp30 juta itu lebih absurd lagi, lebih mimpi lagi, mimpi di siang bolong,” tegas Bhima.

Menurutnya, Ganjar tidak perlu untuk mengumbar janji manis mengenai pendapatan guru. Seharusnya, Ganjar lebih memperhatikan permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh guru PPPK atau honorer.

Dikatakan Bhima, selama ini guru PPPK dan honorer belum cukup sejahtera. Apalagi, tanggung jawab mereka sama dengan guru ASN. Malah, terkadang tanggung jawabnya lebih berat.

“Harusnya, bukan masalah nominal gajinya, tapi yang harus dipas-

tikan bagaimana setiap tahun ada peningkatan kesejahteraan guru, baik guru ASN maupun guru PPPK atau guru honorer,” jelas Bhima.

Dia mengatakan, lebih baik Ganjar berbicara regulasi mengenai kesejahteraan guru honorer. Sekarang ini, masih banyak guru honorer yang belum diangkat sebagai ASN. Padahal sudah mengabdikan bertahun-tahun.

hun-tahun.

“Jadi, misalkan juga lebih banyak diangkat guru honorer menjadi guru ASN, atau diberikan standar tunjangan sebagai perlindungan sosial,” kata Bhima.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara guru ASN dan guru honorer. Dia menyebut, mengangkat guru honorer menjadi ASN tidak membuat negara menjadi bangkrut. “Sehingga, Gap (jarak) kesenjangan antara guru ASN dan non ASN itu semakin menyempit,” jelas Bhima.

“Jadi, daripada muluk-muluk gaji Rp30 juta per bulan gaji guru, lebih baik difokuskan adanya peningkatan yang bisa terukur,” kata Bhima menambahkan.

Dia berpendapat, jika berbicara mengenai gaji, pemerintah bisa saja menaikkan gaji guru setiap tahunnya. Jika kelak Ganjar menjadi presiden sampai jabatannya berakhir nanti gaji terus alami kenaikan yang cukup signifikan.

“Misalkan gaji guru naik setiap bulan, misalnya bisa 30 persen setiap tahunnya. Sehingga, pada 2029 menjadi sekian, kebutuhan anggarannya untuk guru se-Indonesia oleh APBN itu sekian, dan dicari dananya, misalkan

dari 20 persen dana pendidikan,” terang Bhima.

Selain itu, Bhima menyarankan APBN untuk pendidikan juga bisa dilakukan penghematan. Sehingga, dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan para guru se-Indonesia.

Bhima juga menyarankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tidak mengeluarkan anggaran negara untuk kegiatan yang tidak penting.

“Ada penghematan, tidak perlu banyak pengeluaran yang tidak urgent, efisiensi dilakukan, perjalanan dinas dipangkas, kemudian ada belanja rapat-rapat itu semuanya dipangkas. Jadi belanja birokrasi untuk pendidikan itu dikurangi sehingga ada penghematan untuk kesejahteraan guru secara bertahap. Itu yang ingin didengar,” jelas Bhima.

Dia memandang, janji Ganjar yang ingin guru di seluruh Indonesia menerima gaji sekitar Rp30 juta sulit untuk diwujudkan. Sebab, jumlah guru di Tanah Air cukup banyak. Sehingga, APBN tidak dapat memampungnya. Kata dia, akan terjadi pembengkakan yang sangat besar jika Ganjar mewujudkan janjinya tersebut.

“Jadi ini lebih absurd lagi sebenarnya. Karena kalau Rp30 juta dikalikan jumlah guru yang sangat besar tentunya tidak akan sanggup APBN juga sekarang. Justru khawatir yang terjadi adalah programnya tidak bisa jalan,” kata Bhima.

Dia menilai, janji Ganjar itu hanya kebijakan sekadar untuk mencari simpati publik. Dia pun mempertanyakan sumber yang untuk menggaji para guru tersebut.

“Ini bukan hanya kebijakan populis, tapi absurd ya untuk yang Ganjar. Karena kalau Rp30 juta itu apakah semuanya akan dibiayai negara? Atau untuk guru di sekolah swasta? Jadi enggak ada kejelasan teknisnya,” tandas Bhima. ●RDO





“Terhadap calon presiden dan wakil presiden tersebut harus dilihat rekam jejaknya, kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang, serta pelanggaran HAM mana pun termasuk tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi”

Halim Jeverson Rambe

JANJI MANIS PRABOWO TERCORENG JEJAK MASA LALU

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, mengobral janji politiknya jika terpilih menjadi presiden kedelapan menggantikan Joko Widodo. Namun, respons dari masyarakat tidak seluruhnya mengenakan.

Janji-janji politik telah disampaikan Prabowo dalam acara bertajuk “3 Bacapres Bicara Gagasan” yang digelar media Narasi pimpinan Najwa Shihab, berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023.

Pada intinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu memaparkan 17 program prioritas yang merupakan gagasan kesejahteraan bagi rakyat dan dibingkai dalam tema keberlanjutan visi misi Jokowi tentang Indonesia Emas 2045.

Program paling menarik yang ditawarkan Prabowo adalah soal swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Karena menurutnya, tiga program itu berkaitan langsung dengan rakyat Indonesia di saat dunia tengah dihantam gelombang krisis. Serta didukung dengan janjinya menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.

Sementara dari sisi ekonomi, Menteri Pertahanan itu menyebutkan gagasannya soal hilirisasi dan industrialisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara makmur. Ditambah, Prabowo juga menjanjikan penyempurnaan tata kelola keuangan negara untuk bisa menunjang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta dapat mengentaskan angka kemiskinan dan program rumah murah untuk masyarakat desa.

Dari sisi penegakan hukum dan pertahanan, Prabowo menawarkan gagasan pemberantasan korupsi yang lebih maksimal, pemberantasan narkoba sebagai cara meningkatkan kualitas generasi muda, serta penguatan pertahanan negara agar tidak diinjak-injak bangsa lain.

Sementara sisanya, Prabowo menggagas visi yang melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan IKN sebagai pemerataan, akses kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, menjamin pelestarian lingkungan hidup, pele-

starian seribu daya dan peningkatan ekonomi kreatif, dan juga mendongkrak prestasi olahraga hingga kancah internasional.

Sementara, janji politik di masa awal pemerintahannya kelak jika terpilih di Pilpres 2024, dia menjanjikan delapan program terlaksana. Di antaranya, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, mencetak, memproduksi lumpung pangan, melanjutkan program kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, kartu sembako, dan kartu pra kerja.

Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus itu juga mengiming-imingi program makan siang dan susu gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil di Indonesia, peningkatan rasio panglima negara, dan menaikkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan kepala desa serta perangkat desa.

Di tengah manisnya janji-janji Prabowo tersebut jelang pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober 2023, sekelompok mahasiswa yang menamakan diri sebagai Pro Kader Lin-tas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi), mengajukan uji materiil Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Kuasa Hukum Proklamasi, Halim Jeverson Rambe, mengungkapkan, kliennya meminta agar mengubah aturan tersebut yang intinya menuntut keterbukaan latar belakang capres-cawapres yang ter-muat dalam data-data persyaratan yang dise-tor ke KPU.

“Ter-

hadap calon presiden dan wakil presiden tersebut harus dilihat rekam jejaknya, kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang, serta pelanggaran HAM mana pun termasuk tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi,” ujar Halim dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Info Indonesia, Jumat, 22 September 2023.

Dia mengatakan, Proklamasi mengharap-kan kontestasi Pemilu 2024 nanti bisa diikuti calon-calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, mengetahui rekam jejak calon sangat penting untuk menjadi pengetahuan bagi pemilih pemula.

“Dalam permohonan ini kami meminta MK untuk memutuskan bahwa KPU dan Bawaslu bertugas untuk melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak capres dan cawapres yang akan terlibat dalam kancah Pilpres 2024 dan seterusnya. Selanjutnya KPU dan Bawaslu menyampaikan hasilnya kepada rakyat Indonesia,” urai Halim.

Tuntutan Proklamasi tersebut juga diikuti penyampaian surat terbuka untuk Prabowo dan dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo yang diusung PDIP bersama PPP dan Perindo; serta Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS menggunakan perahu Koalisi Perubahan.

Poin tuntutan tersebut di antaranya meminta Prabowo, Ganjar, maupun Anies untuk secara terbuka bersama-sama bakal calon wakil presidennya nanti secara ksatria menyampaikan rekam jejaknya di masa

lalu.

“Yang meliputi rekam medis (kesehatan fisik dan mental), tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan/pemberhentian semasa menjabat/memimpin di lingkungan militer atau sipil,” urai Halim.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih capres dan cawapres, Halim memastikan para mahasiswa yang tergabung dalam Proklamasi tidak ingin memilih di Pilpres seperti membeli kucing di dalam karung.

“Tetapi, harus seperti memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit dan bobot. Begitu pula memilih presiden dan wakil presiden yang akan membawa arah nasib bangsa dan negara ke depannya,” harapnya.

Maka dari itu, Halim berharap gugatan uji materiil norma di UU Pemilu itu dalam diterima MK agar KPU dan Bawaslu bisa terbuka dalam proses verifikasi capres dan cawapres, alih-alih bukan justru seperti tukang stempel yang hanya memverifikasi biodata dan dokumen secara administratif tanpa memastikan keabsahan dan kebenaran datanya.

“Kita berharap KPU dan Bawaslu bekerja memverifikasi capres dan cawapres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap rekam jejak para capres dan cawapres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya (verifikasi) tentang rekam jejak tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Halim.

Halim menyampaikan maksud dibuatnya surat terbuka kepada Prabowo, Ganjar, dan Anies yaitu dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka atas banyaknya berita yang beredar luas di masyarakat, dan diduga sebagai koreng masa lalu karena perbuatannya.

“Contohnya mengaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen rembang. Juga berita yang mengaitkan Pak Prabowo dalam dugaan kasus pelanggaran HAM, penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan yang terbaru kasus Food Estate. Serta berita yang mengaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan masuk menjadi bagian dari kelompok Islam radikal,” paparnya.

“Untuk itu, kami yakin bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersikap gentleman menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada rakyat Indonesia tentang rekam jejak sebagaimana layaknya seorang patriot sejati,” begitu bunyi terakhir surat terbuka Proklamasi.

•RDO





TIDAK NETRAL, ASN KENA SANKSI BERAT

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 terkait isu strategis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, isu netralitas ASN masuk dalam kerawanan pelanggaran Pemilu tertinggi. “Dugaan pelanggaran yang enggan pernah lepas dari lima terbesar. Salah satunya adalah netralitas ASN,” kata Lolly dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik Netralitas ASN di Ballroom Grand Kawanua Novotel Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 21 September 2023.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu, terdapat sepuluh provinsi dengan kerawanan tertinggi netralitas ASN. Maluku Utara dengan skor kerawanan tertinggi yakni 100. Lalu, Sulawesi Utara 55,87; Banten 22,98; Sulawesi Selatan 21,93; dan Nusa Tenggara Timur 9,40; Kalimantan Timur 6,01; Jawa Barat 5,48; Sumatera Barat 4,96; Gorontalo 3,9; dan Lampung 3,9.

Dia menjelaskan, terkait pengumpulan data informasi mengenai IKP Tematik netralitas ASN ini didapatkan melalui pengalaman yang terjadi di Pemilu 2019. Selain itu, pihaknya juga melibatkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

“Identifikasi peristiwa dan kasus pelanggaran pemilu dalam pengalaman pemilu 2019 dan persiapan pemilu 2024 dengan melakukan pendalaman ke pihak-pihak terkait (Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota), baik melalui tatap muka maupun melalui pengisian data,” terang Lolly.

Dia menjelaskan, untuk Manado sebelumnya juga masuk dalam wilayah dengan kerawanan Pemilu tertinggi. Dia mengatakan acara yang dilangsungkan di Manado ini untuk memberikan kesadaran terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.

“Supaya nanti menjadi kesadaran semua pihak. Tidak hanya teman-teman Bawaslu, tapi seluruh masyarakat yang ada di Manado, termasuk peman-ku kepentingan. Sehingga, semua orang menjadi menjaga Sulawesi Utara ini tidak terulang lagi. Kan, kita membuat IKP ini supaya menjadi kaca mata, cara pandang kita ke depan yang rawan tinggi ini tidak menjadi rawan tinggi,”

jelas Lolly.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu ini berharap, dengan diluncurkannya IKP ini, ke depannya ASN bisa bersikap netral di Pemilu 2024.

“Harapan ke depannya sih akan semakin banyak teman-teman ASN yang punya jiwa-jiwa yang kuat untuk selalu netral dalam proses kontestasi kita menjelang 2024,” jelas Lolly.

Dia menerangkan, Bawaslu dapat melakukan penanganan pelanggaran ASN tidak hanya menggunakan dasar hukum pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Dia mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk menindaklanjuti terkait pelanggaran netralitas ASN.

“Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, pidana Pemilu, etik, lalu undang-undang hukum lainnya,” kata Lolly.

Salah satu yang sangat disoroti oleh Bawaslu adalah netralitas ASN pada Pemilu 2024. Dikatakan Lolly, ASN memiliki undang-undang tersendiri. Maka dari itu, Bawaslu juga menerapkan hukum terhadap ASN yang berkaitan dengan UU ASN. “Karena memang mereka sudah punya undang-undang ASN sendiri, peraturan pemerintah sendiri soal disiplin ASN,” jelas

Lolly.
Dia

menjelaskan, jika didapati ASN yang tidak netral atau terlibat dalam politik praktis, maka pihaknya akan melakukan kajian dalam menentukan hukum yang digunakan terhadap ASN yang melanggar.

“Bawaslu akan melakukan kajian, kajian hukumnya seperti apa kami rekomendasikan ke atas,” kata Lolly.

Tidak hanya itu, Lolly menyampaikan bahwa pihaknya juga akan melibatkan beberapa stakeholder terkait dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu netralitas ASN.

“Tugas pengawasan Bawaslu dalam Pemilu salah satunya adalah terkait netralitas ASN. Namun, tugas ini melibatkan stakeholder lain dalam pengawasan akhir KASN, BKN, KemenPANRB, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan lainnya,” terang Lolly.

Dia mengatakan, pelanggaran ASN ini sering terjadi pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Bawaslu mencatat setidaknya ASN kerap mengikuti kegiatan politik praktis seperti kampanye.

“Mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya, penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent, teridentifikasi dukungan dalam bentuk WhatsApp Grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye,” jelas Lolly.

Oleh karena itu, para stakeholder diminta untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dia pun mengingatkan kepada ASN untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

“Sosialisasi kepada seluruh ASN secara besar-besaran secara masif terkait pentingnya ASN bersikap netral, baik secara daring maupun luring,” kata Lolly.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, menyampaikan, terdapat sanksi tegas terhadap ASN yang tidak netral dalam Pemilu.

Setidaknya ada tiga regulasi yang melat-

rang ASN terlibat aktivitas politik praktis, yakni Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 tentang ASN, Pasal 70 ayat (1) Nomor 10/2016, Pasal 5 PP 94/2021 tentang Disiplin ASN. Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 tentang ASN berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) Nomor 10/2016 menyatakan, dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota kepolisian dan anggota TNI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 5 PP 94/2021 tentang Disiplin ASN menyatakan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara ikut kampanye, peserta kampanye, atribut partai dan lain-lain.

Dia mengatakan, terkait kewajiban netralitas ASN ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dikeluarkan pada 22 September 2022.

“Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 22 September 2022 terkait pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dalam pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah serentak 2024,” jelas Togap.

Dia menerangkan, ada sanksi berat yang menanti ASN jika tidak bersikap netral atau melanggar kode etik. Sanksi tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004.

“Sanksi moral terbuka yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka. Sanksi moral tertutup, sanksi moral yang diberikan oleh Instansi yang berwenang dan diumumkan secara tertutup atau terbatas,” jelas Togap.

Tidak hanya itu, para ASN yang tidak netral juga akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin. Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) PP 94/2021.

Dia menjelaskan terdapat dua sanksi disiplin yakni hukuman disiplin sedang yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) PP 94/2021. “Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen (dua selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan,” terang Togap.

Selanjutnya, sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) PP 94/2021. Sanksi ini bisa sampai ancaman pemecatan. “Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” ungkap Togap. ●RDO





“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud jika komponen pemilu seperti penyelenggara, peserta dan pemerintah berkomitmen dalam proses dan suksesi sesuai perintah konstitusi”

Hasnu Ibrahim

INFO
KPU

7

Minggu IV • September 2023

KPU LEMPAR MASALAH KAMPANYE KE BAWASLU

Pesan politik berbau kampanye masif beredar di berbagai kanal oleh sosok-sosok yang digadang-gadang bakal menjadi kontestan pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Fenomena itu disinyalir karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15/2023 tentang Kampanye tak mengatur secara jelas dan tegas.

Kebingungan bahkan muncul dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindak dugaan pelanggaran kampanye colongan, yang dilakukan pihak-pihak yang belum resmi menjadi kontestan pemilihan. Sebab, KPU dalam aturannya itu hanya mengatur soal satu hal yang boleh dilakukan partai politik yaitu sosialisasi.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) PKPU 15/2023, parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal sebelum masa kampanye pemilu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada KPU dan Bawaslu. Selain itu, juga diperbolehkan memasang bendera parpol yang memuat logo dan nomor urutnya, tapi hanya di wilayah internal parpol.

Sementara, PKPU 15/2023 tidak spesifik mengatur tentang larangan sosialisasi bagi pihak-pihak yang belum resmi menjadi peserta pemilu, seperti bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden atau bakal calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD RI. Yang ada, justru larangan tentang sosialisasi yang memuat ajakan memilih.

Permasalahan kampanye di luar jadwal ini disoroti Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), yang juga menemukan beberapa contoh konkret dari beberapa kejadian terbaru yang mengemuka di publik. Bahkan, dilakukan oleh elite-parpol yang menduduki posisi penting di pemerintahan pusat maupun daerah.

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim, menyampaikan, definisi kampanye politik secara sederhana berarti bagian dari upaya terorganisir yang dilakukan parpol peserta pemilu, relawan, tim sukses, dan pihak yang ditunjuk secara resmi oleh calon untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih atau upaya membangun preferensi publik.

Namun, dirinya menegaskan kampanye Pemilu Serentak 2024 yang di dalamnya memuat Pileg 4 kotak dan

Pilpres, baru bisa dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari, sebagaimana tertuang dalam PKPU 3/2022 tentang Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Sekarang keriuhan (masalah kampanye politik di luar jadwal) tersebut sudah terasa menghiasi dinding-dinding demokrasi dan pemilu sebagai konsekuensi logis kampanye politik era demokrasi digital. Karena yang bukan peserta pemilu, bakal calon presiden yang baru diakui parpol dan juga relawannya terkadang melakukan aktivitas kampanye secara terselubung serta berlingkungan dibalik sosialisasi politik,” ujar Hasnu dalam Forum Muda Partisipasi yang digagas Pemantau PB PMII, Rabu, 20 September 2023.

Dia mengungkapkan, KPU yang sebagai mandatori utama dalam melaksanakan pemilu oleh UUD 1945, justru tidak menggodok aturan secara spesifik dan mendalam, serta memiliki tujuan mencegah munculnya permasalahan dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 yang berjalan, termasuk soal kampanye dan masa sebelum kampanye.

Menurutnya, jika kondisi KPU sekarang ini terus berlanjut, maka demokrasi Indonesia bisa semakin terpuruk. Apalagi dalam penyusunan regulasi teknis tahapan-tahapan pemilu tidak dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam proses penyusunannya.

“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud jika komponen Pemilu seperti penyelenggara, peserta Pemilu dan pemerintah berkomitmen dalam proses dan suksesi sesuai perintah konstitusi. Kita semua tentu berkepentingan menghadirkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, transparan dan berintegritas. Akan tetapi, jika pada level implementasi dan pelaksanaannya tidak jujur dan tidak sehat, maka ini gejala awal dari kerontokan demokrasi,” singgungnya.

Contoh kebobrokan manajemen kampanye di luar jadwal yang menimbulkan pola-pola yang bersifat ilegal atau colongan, disebutkan Hasnu berdasarkan pemantauannya adalah kejadian bagi-bagi uang oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, kepada masyarakat nelayan.

Serta, ada juga kejadian penyebaran video beberapa kepala daerah PDIP yang di dalamnya termasuk anak dan mantu Presiden Joko Widodo, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang isinya mengajak pengguna media sosial

X

memilih Ganjar Pranowo.

“Baru-baru ini kita juga dikagetkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang dicalonkan sebagai bakal capres yang menyatakan; ‘kalau masyarakat menemukan ada caleg dan calon yang bagi-bagi uang, terima saja, tapi jangan dulu dukung’. Pernyataan Prabowo ini sungguh merusak akal sehat publik dan merobohkan wibawa demokrasi,” tutur Hasnu.

“Aksi heroik lainnya datang dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada nelayan. Akankah aksi serupa muncul dari elite parpol dan para caleg? Jika aksi-aksi nakal seperti ini kedepannya akan bermunculan, maka ini akan memperpanjang kondisi buruk potret pemilu di Indonesia atau disebut sebagai pasar gelap demokrasi,” sambung dia.

Setelah hampir satu setengah tahun terlibat dalam melakukan pemantauan pemilu dan mengawal demokrasi di Indonesia, Hasnu bersama PB PMII memandang ada empat variabel penting dalam menyukseskan Pemilu 2024. Yaitu demokratis, integritas, bermartabat dan berwibawa. Menurutnya, variabel-variabel itu menjadi ikhtiar bersama dalam melakukan edukasi publik, pendidikan politik, menggalang solidaritas dan partisipasi aktif publik, peringatan dini dan upaya mitigasi kolektif.

“Pemilu berkualitas hanya dapat terwujud jika kemudian beberapa variabel penting dalam sistem elektoral yakni penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), Peserta Pemilu (Parpol dan Caleg, Capres-Cawapres, hingga calon perseorangan), dan Pemerintah (Presiden dan Wapres, Menteri, TNI, Polri, BIN, ASN, serta Birokrasi) berkomitmen dalam menciptakan pemilu berkualitas, integritas dan

demokratis di tanah air menyambut Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

Terkhusus untuk penyelenggara Pemilu, Hasnu meminta kepastian dari sikap independen, profesional, dan tidak partisan dalam melaksanakan pesta demokrasi mendatang. Sebab dia memandang, harapan publik begitu besar kepada penyelenggara Pemilu menuju hari H pencoblosan Pemilu di 14 Februari 2024.

“Penyelenggara Pemilu harus merasa dirinya sebagai lembaga yang seperti manusia setengah dewa. Mereka nyaris tidak boleh genit, tidak boleh cawe-cawe ikut dalam kemenangan salah satu kandidat. Sebab, ketika penyelenggara pemilu seperti dari unsur KPU dan Bawaslu ikut cawe-cawe atau genit dalam urusan politik elektoral, tentu kualitas demokrasi Indonesia akan sangat terancam,” ungkap Hasnu.

“Variabel penyelenggara pemilu ini penting agar disorot publik, diingatkan sejak awal. Kita semua tahu bahwa salah satu instrumen kemenangan Pemilu seringkali melibatkan oknum dari penyelenggara pemilu yang agak sedikit nakal untuk mengorkestrasi kemenangan elektoral,” tambahnya.

Di sisi lain, Hasnu juga mendorong pemerintah dan instrumen negara lainnya seperti menteri, Polri, TNI, BIN, ASN, dan birokrasi agar menjaga wibawa, moralitas dan etik serta independen. Pasalnya, dia tidak ingin kegagalan terbesar dalam menghadirkan pemilu berkualitas dan demokratis dikarenakan pemerintah tidak netral atau terlibat dalam skenario jahat untuk mengatur proses dan memutuskan hasil.

“Menjelang pemilu 2024, tidak ada lagi tekanan dari pemerintah kepada penyelenggara seperti KPU dan Ba-

waslu untuk menjadi variabel kemenangan politik. Begitupun TNI, Polri, dan BIN tidak boleh ikut campur atau genit dalam urusan elektoral, birokrasi dan ASN. Mereka harus juga kembali insyaf agar menjaga kode etik kepegawaian,” tutup Hasnu.

• RDO



“Ketika berencana maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Zaki akan membawa pengalaman kepemimpinan daerah sebagai modal”

Karyono Wibowo



MAJU PILKADA DKI AHMED ZAKI HARUS BERPRESTASI

Ahmed Zaki Iskandar akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tangerang dua periode pada 21 September 2023. Dia disebut-sebut berpeluang besar maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024

Pengamat politik, Karyono Wibowo, menyebut, jika Zaki ingin mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, ada tiga hal yang harus dimilikinya, termasuk prestasi yang dapat meyakinkan pemilih.

Menurut Karyono, Zaki sudah memiliki pengalaman dalam memimpin daerah karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang selama dua periode.

“Ketika berencana maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Zaki akan membawa pengalaman kepemimpinan daerah sebagai modal,” ungkapnya.

Karyono mengingatkan, Zaki bukanlah sosok yang baru dalam dunia politik. Banyak calon gubernur DKI Jakarta sebelumnya berasal dari kepala daerah lokal. Dia mencontohkan Joko Widodo dari Surakarta dan Basuki Thajaja Purnama dari Belitung.

“Namun, tantangan yang dihadapi di DKI Jakarta berbeda dengan Kabupaten Tangerang karena cakupan wilayah dan skala kepemimpinannya lebih besar,” jelasnya.

Hal yang paling penting, menurut Karyono, adalah prestasi yang telah diraih oleh Zaki selama memimpin Kabupaten Tangerang selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun belum ada penelitian mendalam tentang prestasinya, Zaki perlu memiliki prestasi yang dapat dijadikan alasan untuk meyakinkan publik DKI Jakarta.

Karyono kembali memberi contoh Joko Widodo yang memiliki prestasi unik dalam menyelesaikan masalah dan gaya kepemimpinan yang berbeda.

Selain prestasi, Zaki juga perlu memiliki keunikan tersendiri dan konsep visi misi yang jelas dalam memajukan DKI Jakarta. Dia harus memahami permasalahan fundamental yang ada, seperti banjir, kemacetan, polusi udara, masalah permukiman, serta memiliki solusi untuk mengatasi

masalah-masalah tersebut.

“Semua ini dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat DKI Jakarta,” tambahnya.

Karyono juga menekankan, jika Zaki tidak memiliki prestasi, keunikan, dan visi misi yang kuat, maka kesempatannya untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta akan sulit. Meskipun partai politik seperti Golkar dapat mempengaruhi pemilih, kepribadian dan kualitas calon adalah faktor yang lebih dominan dalam menentukan keterpilihannya.

Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menambahkan, Zaki dapat mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta, tetapi keputusan tersebut juga bergantung pada Partai Golkar, mengingat ada saingan lain seperti Ridwan Kamil yang juga berasal dari partai beringin.

“Golkar DKI Jakarta sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengusung M Ridwan Kamil dalam Pilkada 2024, dan calon yang diusung oleh partai tersebut adalah Ahmed Zaki Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tangerang,” sambungnya.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, mengklaim, pihaknya belum memiliki rencana konkret

untuk mendukung Ridwan Kamil dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2024. Menurutnya, prioritas mereka saat ini adalah mengusung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar.

Baco menyatakan, keputusan ini sudah diambil berdasarkan Musyawarah Daerah (Musda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Proses sosialisasi untuk mendukung Ahmed Zaki telah berjalan cukup lama.

“Untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur DKI Jakarta, kami sudah melakukan persiapan yang panjang, serta proses sosialisasi yang cukup intensif. Calon kami saat ini adalah Ahmed Zaki Iskandar, sesuai dengan keputusan Musda dan Rakerda. Kami telah melakukan sosialisasi ini kepada setiap kader dan calon legislatif kami,” bebernya.

Menurut Baco, DPP sebelumnya sudah memproyeksikan Ridwan Kamil untuk maju lagi dalam Pilgub Jawa

Barat. Sementara, Ahmed Zaki telah disiapkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Airin Rachmi Diany untuk menjadi calon gubernur Banten.

“Jika Ridwan Kamil maju di DKI, maka Zaki tidak dapat maju di Jawa Barat. Atau bisa dikatakan, plot sudah disusun sedemikian rupa. Harapannya adalah agar proses ini tidak terganggu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Baco juga menyoroti perbedaan senioritas di dalam partai. Ia menganggap jika Ridwan Kamil benar-benar maju sebagai calon gubernur DKI, hal ini akan melangkahi Ahmed Zaki yang telah lebih lama berkiprah di Partai Golkar. Ridwan Kamil baru saja bergabung dengan Golkar pada 18 Januari 2023.

“Ridwan Kamil adalah anggota baru dalam partai ini, belum genap setahun. Sementara Zaki telah terkait dengan Golkar sejak lama, bahkan sejak usia sangat muda. Oleh karena itu, yang baru harus menghormati senioritas,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan partainya telah mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki rencana untuk mendukung Ridwan Kamil.

Partai Golkar memastikan bahwa peran Ridwan Kamil ke depannya adalah sebagai calon gubernur, bukan sebagai calon wakil presiden. Hal ini untuk menjawab pertanyaan mengenai peluangnya menjadi calon wakil presiden bagi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2024.

“Tentang Ridwan Kamil, kami sudah memiliki rencana untuk RK. Kami telah memutuskan untuk mendukung RK sebagai calon gubernur. Tinggal memilih apakah di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta,” pungkasnya. ● IRY





“Ganti saja (sama)
anak muda”

Sahbirin Noor

INFO PILKADA

Minggu IV • September 2023

9

KALSEL BUTUH PEMIMPIN MUDA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan masih satu tahun lagi. Namun, pembicaraan mengenai siapa yang akan menggantikan Sahbirin Noor-Muhiddin menjadi topik yang ramai dibicarakan publik.

Partai politik sedang melakukan perhitungan strategis dan mempersiapkan diri untuk memenangkan Pemilihan Legislatif yang akan diadakan pada 14 Februari 2024.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengumumkan rencananya untuk pensiun dari dunia politik. Paman Birin mengatakan pemimpin Kalsel yang baru sebaiknya berasal dari kalangan muda.

“Ganti saja (sama) anak muda,” kata Sahbirin Noor.

Pernyataan ini memunculkan spekulasi mengenai sosok politisi muda yang mungkin akan menggantikan Paman Birin. Salah satu nama yang muncul adalah Muhammad Rifqinazmy Karsayuda (MRK), seorang politisi nasional dari Kalsel.

MRK sebelumnya adalah

Ketua Tim Pemenangan Sahbirin Noor-Muhiddin dalam Pemilihan Gubernur Kalsel 2020. Dia juga dikenal sebagai orang dekat Haji Isam, pengusaha na-

sional asal Kalsel yang juga keponakan Sahbirin Noor.

Beberapa waktu yang lalu, MRK telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota DPR dan kader PDIP. Keputusannya itu diambil dengan tujuan untuk fokus pada ambisinya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Kalsel pada 2024.

“Kami saat ini sedang bermunajat sekuat tenaga untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 2024,” ungkap MRK.

Dia ingin memanfaatkan segala pengalaman dan relasinya yang didapat selama empat tahun menjadi Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan di Kalsel pada 2024. Terlebih, Kalsel akan berperan sebagai daerah penyangga bagi Ibu Kota Negara yang baru.

MRK ingin memastikan Kalsel tidak kehilangan peluang tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan baik. “Kalau kita lengah dalam 5 tahun itu, maka saya yakin yang akan mengambil manfaatnya bukan Kalsel, tapi provinsi lain di Kalimantan yang juga menjadi penyangga IKN,” jelasnya.

MRK berharap, jika dipilih sebagai gubernur Kalsel dapat mempercepat pembangunan daerah tersebut.

Terkait posisi yang akan diambilnya dalam Pilgub Kalimantan Selatan 2024, MRK dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin maju sebagai calon orang nomor satu di Kalsel. “Saya hanya mau 01. Kalau 02 saya akan mengurungkan niat untuk maju di pemilihan gubernur,” tegasnya.

Namun, MRK masih enggan mengungkapkan kendaraan politik mana yang akan digunakan untuk menghadapi Pilgub Kalimantan Selatan 2024.

Pemerhati politik Banua, Kadarisman, menjelaskan, masyarakat

mulai menaruh harapan kepada beberapa tokoh yang dianggap pantas untuk menjadi calon gubernur.

Dua nama yang sering disebut adalah Anang Syakhfiani dan Ibnu Sina. Kedua tokoh ini memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelas menengah atas dan kalangan bawah.

Anang Syakhfiani memiliki potensi kuat sebagai wakil dari pemilih Banua Anam yang jumlahnya 28 persen dari pemilih di Kalsel.

“Di sisi lain, Ibnu Sina dapat menjadi representatif bagi masyarakat Banjarmasin dan Batola yang memiliki 23 persen pemilih,” ungkapnya.

Kehadiran Ibnu Sina dalam Pilgub Kalsel dapat menyatukan suara di Batola yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Sementara itu, kehadiran Anang dapat mempererat dukungan dari pemilih di Banua Anam.

“Namun, meskipun keduanya memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pilkada Kalsel, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai posisi sebagai calon gubernur. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Anang adalah ia bukan kader partai politik,” bebernya.

Sementara itu, Ibnu Sina, meskipun saat ini memimpin Partai Demokrat Kalsel, masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk memenuhi syarat menjadi calon orang nomor satu berdasarkan kursi yang dimilikinya di legislatif.

Faktor lain yang akan memengaruhi peluang keduanya

adalah dukungan dari aktor-aktor penting dalam politik Kalsel. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi Anang dan Ibnu Sina mungkin adalah bersaing sebagai calon wakil gubernur pada 2024. Dengan cara ini, mereka dapat menjadi kunci keberhasilan siapapun yang nantinya menjadi calon gubernur.

Selain tiga nama yang sudah lebih dulu dibahas, terdapat nama lain yang disebut-sebut sebagai calon gubernur. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah pernah bersaing di pemilihan sebelumnya, seperti Zairullah Azhar dan Muhiddin. Adapula nama seperti Pangeran Khairul Saleh.

Zairullah dan Muhiddin memiliki popularitas yang kuat, terutama karena mereka sudah memiliki pengalaman dalam Pilkada sebelumnya dan saat ini menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

“Namun, popularitas saja tidak cukup, dan elektabilitas mereka akan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang mereka terima,” tambahnya.

Zairullah, meskipun memiliki popularitas di daerah pesisir, tidak begitu kuat di daerah lain. Pada pemilu gubernur sebelumnya, ia hanya berhasil meraih 18 persen suara, meskipun sudah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh di Hulu Sungai Selatan.

Muhiddin memiliki potensi yang lebih besar, terutama dengan dukungan dari Pangeran Khairul Saleh, yang memiliki pengaruh kultural yang kuat di Kabupaten Banjar. Namun, Muhiddin juga memiliki kerawanan, terutama di kalangan pemilih kelas menengah ke atas yang pada pemilu sebelumnya memilih Denny Indrayana.

● IRY



“Ruksamin dikenal sebagai politisi petarung yang cakap dan ulet. Sementara Sjafei Kahar dianggap sebagai tokoh birokrat Sulawesi Tenggara”

Najib Husain



CAGUB SULTRA MULAI TEBAR JANJI

Persaingan dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 kini memunculkan dua tokoh yang semakin menonjol. Mereka adalah Ruksamin dan Sjafei Kahar.

Kehadiran keduanya menjadi sorotan karena dianggap sebagai pasangan ideal yang memiliki potensi kuat untuk memimpin Sulawesi Tenggara.

Ruksamin adalah seorang politisi yang telah lebih awal mendeklarasikan niatnya untuk maju dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2024. Sementara, Sjafei Kahar yang baliho kampanyenya sudah terpajang di berbagai tempat, berambisi untuk kembali bertarung di Pilgub 2024.

Pengamat politik Sulawesi Tenggara, Najib Husain, menyatakan, perpaduan antara Ruksamin dan Sjafei Kahar adalah konfigurasi ideal yang menggabungkan representasi daratan dan kepulauan. Kedua tokoh ini juga mewakili perpaduan antara politisi berpengalaman dan tokoh birokrasi yang ulung.

“Ruksamin dikenal sebagai politisi petarung yang cakap dan ulet. Sementara Sjafei Kahar dianggap sebagai

tokoh birokrat Sulawesi Tenggara,” kata Najib Husain.

Dalam pandangan Najib, Ruksamin yang mewakili daratan memiliki daya tarik tersendiri. Begitu juga dengan Sjafei Kahar yang mewakili wilayah kepulauan. Keunggulan ini akan menjadi modal yang sangat kuat dalam merebut mayoritas suara pemilih yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Keduanya telah terbukti memiliki kapabilitas yang diakui oleh masyarakat. Ruksamin telah menjabat sebagai Bupati Konawe Utara selama dua periode. Dia saat ini memimpin DPW PBB Sulawesi Tenggara. Dia juga menjadi Koordinator Presidium KAHMI dan memiliki keterlibatan dalam organisasi besar lainnya.

Sementara itu, Sjafei Kahar pernah menjabat sebagai Bupati Buton selama dua periode yang mencakup enam kabupaten yang kini telah berdiri sendiri, yakni Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Bombana, dan Baubau.

“Jadi, jejak politik yang telah mereka ukir menunjukkan bahwa keduanya memiliki basis suara yang sangat kuat dan layak diperhitungkan,” tambah Najib.

Doktor alumni Universitas Gadjah Mada ini juga menekankan, jika Ruksamin dan Sjafei Kahar benar-benar berpasangan di Pilgub Sultra 2024, hal ini akan menjadi catatan penting dan peringatan bagi calon lain yang ingin menjadi lawan mereka.

Ruksamin sendiri telah mendeklarasikan niatnya untuk maju dalam Pilgub dengan membawa program-program unggulan,

seperti menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia dan program Rp500 juta untuk setiap desa/kelurahan, serta pendidikan gratis.

“Berbagai program prioritas, ide dan gagasan telah saya siapkan, maka saya menyatakan kesiapan saya untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara untuk periode 2024-2029,” kata Ruksamin.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara tegas menyatakan dukungannya untuk Kery Saiful Konggoasa di Pilgub Sultra 2024.

“Kery adalah calon Gubernur,” kata Surya Paloh sembari merangkul Kery.

Surya Paloh juga menyebutkan Tina Nur Alam sebagai calon gubernur potensial Sultra 2024. “Dan juga ada Ibu Tina calon gubernur,” sembari melirik Tina Nur Alam.

Surya Paloh merasa bangga dengan semangat tinggi kader-kader Partai NasDem di Sultra. Dia optimistis mereka akan membawa Partai NasDem menjadi pemenang dalam Pemilu 2024.

Kery Saiful Konggoasa dengan antusias menjawab pernyataan Surya Paloh dengan kesiapan maksimal jika DPP NasDem memilihnya untuk bertarung dalam Pilgub Sultra 2024. Dalam posisinya sebagai Bupati Konawe yang telah menjabat selama dua periode, Kery berkomitmen untuk menggunakan semua kemampuannya dalam upaya merebut kursi orang nomor satu di Sulawesi Tenggara.

“Tentunya sebuah berkah dan pelecut semangat mengabdikan kepada masyarakat Bumi Anoa jika DPP

mengamanahkan saya untuk tampil di Pilgub 2024,” kata Kery Saiful Konggoasa.

Namun, Kery juga mengungkapkan bahwa sebelum terlibat dalam Pilgub, ia akan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI di Dapil Sultra. Tujuannya adalah untuk membantu Partai NasDem mengumpulkan kursi di Senayan.

Kery menegaskan bahwa ia akan tetap patuh pada ideologi partai dan mengikuti arahan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

“Pada prinsipnya, kami senantiasa patuh pada ideologi partai dan arahan Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh,” tegas Kery.

Tina Nur Alam menambahkan, terdapat sejumlah program dari Bantuan Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) yang akan diterapkan apabila terpilih dalam pesta politik lima tahunan itu.

Tina menjelaskan, sebelumnya pada kepemimpinan Nur Alam 2008, saat APBD Sultra sebesar Rp860 miliar, diberikan bantuan dana sebanyak Rp100 juta per desa. Apalagi, saat ini APBD Sultra sudah mencapai sekitar Rp5,7 triliun. “Artinya jika perhitungan dari anggaran tersebut, maka bisa disalurkan Rp300 juta per desa,” tambahnya.

Selain itu, ia juga bakal melanjutkan program Cerdas Sultraku berupa beasiswa kepada masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

“Program terakhir yakni bantuan kesehatan dengan pengobatan gratis sampai rawat inap kelas 3 bagi masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.

Dia juga akan memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di seluruh wilayah Sultra sepanjang 1.009 kilometer.

“Tentunya masih banyak lagi program yang akan dijalankan apabila nanti saya terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara,” pungkasnya. ●
IRY





“Secara khusus mereka adalah fasilitator demokrasi, bersikap profesional, netral, mengedepankan semangat pelayanan publik”

Andries Lionardo

INFO PILKADA

Minggu IV • September 2023

11

JURUS DEWA DI TAHUN POLITIK

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi melantik tujuh penjabat bupati dan wali kota yang akan meneruskan kepemimpinan kepala daerah menyusul berakhirnya masa jabatan di tujuh daerah tersebut.

Herman Deru menekankan agar tujuh penjabat bupati dan wali kota harus memegang teguh serta menjalankan dengan baik amanat yang diberikan negara.

“Artinya, negara percaya dan yakin jika para penjabat bupati dan wali kota ini dapat melanjutkan kepemimpinan sebagai kepala daerah. Kepercayaan ini harus dijaga dengan baik,” kata Herman Deru.

Tidak hanya itu, dia juga menegaskan, penjabat bupati dan wali kota harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan bupati atau wali kota sebelumnya maupun dengan jajaran instansi vertikal. Apalagi, para penjabat bupati dan wali kota tersebut harus di-

hadapkan dengan tantangan berat di tahun politik. “Menghadapi tahun politik ini kita harus kerja cerdas dan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Tidak hanya itu, penjabat bupati dan wali kota yang telah dilantik juga harus berhadapan dengan banyak pekerjaan rumah yang saat ini belum tuntas. Di antaranya upaya penurunan stunting, kemiskinan, dan lainnya.

“Termasuk juga pembangunan di daerah eks transmigrasi. Pembangunan di wilayah ini adalah tanggung jawab bersama tanpa melihat di bawah wewenang siapa. Penjabat bupati dan wali kota ini harus tinggalkan warisan atau legacy saat kembali lagi menjadi ASN,” ujarnya.

Pengamat politik dan akademisi Universitas Sriwijaya, Andries Lionardo, mengatakan, semua penjabat bupati dan wali kota yang baru dilantik memang harus menunjukkan kinerja terbaiknya. Mereka harus mampu menjadi fasilitator dalam kehidupan demokrasi yang baru untuk menjaga stabilitas



Pelantikan Pj Bupati dan Wali Kota di Sumsel

demokrasi dari Pilkada tidak serentak menjadi Pilkada serentak.

“Secara khusus mereka adalah fasilitator demokrasi, bersikap profesional, netral, mengedepankan semangat pelayanan publik,” ungkapnya, Kamis, 21 September 2023.

Untuk pembangunan berkelanjutan, kata Andries, tugas penjabat harus mempertahankan dan melanjutkan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.

“Dari semua penjabat ini diyakini sangat mampu untuk mengemban amanah, karena penjabat yang terpilih adalah kehendak politik pemerintah pusat dan melalui tahapan seleksi oleh Kemendagri. Mereka adalah yang terbaik dan diyakini mampu,” ulasnya.

Tujuh penjabat bupati dan wali kota ini diharapkan mampu menjadi pelayan publik dan aktor demokrasi yang benar-benar diinginkan k a n

masyarakat.

“Semua tujuh penjabat semua mampu dan terbaik, tinggal bagaimana penjabat mampu menyelesaikan masalah secepatnya dan mencari jalan keluar,” ujarnya.

Sementara, itu Penjabat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, terpilih sebagai penjabat adalah amanah, sehingga dia akan berusaha bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada.

Ratu Dewa menyebut pelayanan publik harus menjadi prioritas. Infrastruktur perkotaan akan dilaksanakan mulai dari segala lini seperti jalan, penerangan dan pemerataan bidang pendidikan serta kesehatan.

“Seperti penanganan stunting, inflasi dan nanti kita juga akan berbicara mengenai program smart city di kota Palembang,” tambahnya.

Diketahui dari 19 destinasi wisata, baru dua yang diperkenalkan ikut menjadi sorotan. Sedangkan penanganan daerah kumuh, stunting, inflasi merupakan pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.

Terkait penanganan kabut asap yang sempat menyita perhatian publik, kata dia, juga merupakan permasalahan yang terus berulang dan perlu dilakukan pembentukan tim.

“Saya sudah bicara dan akan melakukan kerja sama dengan Komandan Korem (Danrem) serta melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.

Sedangkan, mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo memilih untuk kembali berkebon seperti dahulu di kampung halaman setelah mengakhiri masa jabatan sebagai orang nomor satu di Palembang.

“Saya kembali ke habitat sebagai anak petani dan akan kembali pergi ke ladang dan bersawah,” terangnya.

Harnojoyo mengakui tidak mencalonkan diri pada Pileg 2024 karena namanya tidak masuk di Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel beberapa waktu lalu.

“Nama saya di DCS tidak masuk,” terangnya.

Harnojoyo juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang yang selama ini sudah memberikan amanah untuknya.

“Kami sebagai manusia biasa masih banyak khilaf. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Palembang,” ujarnya.

Untuk diketahui, Herman Deru melantik tujuh Penjabat Bupati dan Wali Kota pada 18 September 2023.

Pauzan Khoiri ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Empat Lawang. Lusapta Kurnia Yudha sebagai Penjabat Wali Kota Pagaralam. Ratu Dewa sebagai Penjabat Wali Kota Palembang. Ahmad Rizali sebagai Penjabat Bupati Muara Enim. Hani Sopiast Rustam sebagai Penjabat Bupati Banyuasin. Trisko Defriyansa sebagai Penjabat Wali Kota Lubuklinggau, dan Elman sebagai Penjabat Wali Kota Prabumulih. ●IRY

“Syamsul Bahri yang saya kenal merupakan sosok yang mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam berorganisasi dan sangat menghargai perbedaan pendapat serta luwes atau fleksibel dalam pergaulan”

Zain Ismed



KUNCINYA NASDEM HARUS JUARA DI PEMILU 2024

Dengan masuknya Mu-haimin Iskandar dan PKB di koalisi Indonesia Perubahan, menambah keyakinan para kader Partai Nasdem di daerah untuk menjadi pemenang di Pemilu 2024. Sehingga meski dalam survei politik selalu menomortigakan Anies Muhaimin hal itu bukan menjadi masalah karena pada fakta sebenarnya mereka unggul dibanding para kandidat lain.

Sebab pada kenyataannya 80 persen orang lebih memilih Anies, sementara survei di sebuah stasiun televisi juga ternyata memenangkan Anies.

“Tidak masalah selalu dinomortigakan karena bisa jadi lembaga survei itu mendapat bayaran. Yang terpenting bagi kita bagaimana membawa perubahan bagi Indonesia. Kami yakin rakyat sudah pintar untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia di masa depan,” ungkap Sekretaris Partai Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri.

Adanya tiga Cawapres membuat berbagai kemungkinan akan terjadi, bisa satu putaran atau bisa juga dua putaran.

Kalau dua putaran Syamsul Bahri merasa yakin Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang akan maju. Ada beberapa alasan yang mendasari terutama keduanya memenuhi dua unsur yakni penuh pengalaman dan punya pengetahuan yang luas.

“Anies pernah menjadi rektor universitas, pernah jadi Gubernur DKI. Prabowo juga punya pengalaman. Jadi dua itu yang memenuhi syarat. Kalau satu putaran maka Anies lah yang menjadi pemenang. Kalau keinginan Nasdem sih satu putaran saja sehingga bisa efisiensi anggaran negara,” tegasnya.

Pada Pemilu 2024 ini, Partai Nasdem Sumsel yang dipimpin Herman Deru ditargetkan Ketua Umum Surya Paloh harus juara dengan meraih 5 kursi DPR RI.

Untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditargetkan harus terisi di setiap daerah pemilihan (Dapil). Dari 63 dapil dari 84 semua harus terus semua.

Untuk Pilpres, semua kader Partai Nasdem mulai dari DPRD kabupaten/

kota, provinsi hingga DPR RI harus menampilkan sosok dan logo Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada calon presiden pilihan Koalisi Indonesia Perubahan.

“Sementara untuk soliditas koalisi, kami juga telah mendapat surat dari DPP untuk bersama-sama dengan PKS dan PKB untuk menindaklanjuti tim kemenangan dari.

Jadi target kami di Sumsel ini, Nasdem harus juara, itu harga mati,”

Untuk mencapai kemenangan tentu semua harus kerja keras. Tanpa kerja keras tidak akan berhasil.

Target selanjutnya Nasdem akan membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Perubahan yang dimaksudkan adalah mengembalikan, memulihkan, memaksimalkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945.

Memaksimalkan Kegiatan Reses

Untuk menjadi pemenang di Pemilu 2024 ini, Partai Nasdem harus mengisi para kader potensialnya yang masih kosong seperti di Dapil 4, Dapil 7, Dapil 10. Bila semuanya terisi maka target mengisi 13 kursi di DPRD provinsi bisa tercapai bahkan bisa merebut kursi Ketua DPRD.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memaksimalkan kegiatan Reses untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakil Partai Nasdem di kursi legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat di wilayah Dapil.

Syamsul Bahri termasuk orang yang paling konsisten dalam menjalankan kegiatan Reses ini. Berbagai kegiatan dilakukannya sesuai jadwal dan kegiatan yang diadagendakan.

B a h k a n saat mendapat undangan untuk

menghadiri pelantikan Pj Bupati dan Walikota di Sumsel, Kepala Dinas SDA Sumsel 2017 ini tidak bisa hadir karena berbenturan dengan jadwal Reses.

Menurut Syamsul, terkadang ada yang salah juga di masyarakat terhadap Reses bahwa seolah-olah kita bisa menuntaskan persoalan mereka. seperti ada minta pakaian seragam, ada yang minta paket rebana.

“Itu bukan Reses tapi itu permintaan. Reses ini menampung aspirasi rakyat seperti soal infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pendapatan, pengelolaan air bersih. Semua permintaan itulah yang akan kita tampung untuk selanjutnya dibahas di DPRD nanti,” terang Ketua Bapilu Partai Nasdem ini.

Dari hasil pembahasan OPD dan DPRD itu kemudian Gubernur Sumsel akan menurukan anggaran melalui bantuan gubernur (Bangub) sebesar Rp 1,9 triliun.

Tunggu Perintah Partai

Menghadapi Pemilu 2024 mendatang selain fokus pada kemenangan partai di Pileg dan pemenang di Pilpres, tidak menutup kemungkinan bagi Syamsul Bahri juga ikut di Pilkada Kabupaten Muara Enim.

Di Pilkada 2024 lalu, nama Syamsul Bahri sangat populer dan selalu diunggulkan namun hal itu ternyata bukan menjadi jaminan. Sehingga meski masih ada keinginan untuk turun di Pilkada 2024 mendatang, dia tidak mau berspekulasi terlalu besar.

“Kalau soal itu (Pilkada) saya belum tahu karena masih menunggu perintah atasan. Kalau kata pak SP (Surya Paloh) maju yah saya maju. Kalau dari hati kecil yah saya akan maju namun dari etika politik saya juga menunggu perintah partai,” terang pria yang cukup banyak pengalaman di bidang teknis ini.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan

Tata Ruang Sumsel 2016 ini menuturkan, untuk menjadi seorang kepala daerah harus paham karakter wilayah sehingga tahu infrastruktur yang akan dibangun di kawasan tersebut.

Kedua, paham dengan strategi anggaran. Kalau APBD itu bukan untuk kepentingan politik tapi harus untuk rakyat. Kemudian mengerti tentang kekuatan APBN yang bisa diserap ke daerah sehingga tidak hanya mengandalkan keuangan daerah saja.

“Nah kita juga harus paham soal soal lobi untuk mendapatkan dana APBN itu. Ada dana DAU, DAK, dana bagi hasil, banyak sekali,” terang Ketua Bapilu Partai Nasdem ini.

Ketiga harus mampu mengelola sumber daya alam di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten ini sangat kaya dengan sumber alam tinggal mengatur bagaimana mengaturnya sehingga bisa dinikmati masyarakat bukan segelintir orang.

Dimana kekayaan sumber alamnya tertinggi kedua di Sumsel namun angka kemiskinannya sangat tinggi melebihi angka provinsi. Artinya ada yang salah dalam pengelolaannya.

“Sekarang ini coba kita lihat, Muara Enim jadi daerah tertinggal kalah dari Kota Prabumulih dan daerah lainnya. Padahal dulu kabupaten ini selalu jadi percontohan. Insya Allah kita akan bangun Muara Enim lebih lagi ke depan,” ucap Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel tersebut.

Sementara strategi yang akan ditawarkan adalah mensinergikan pembangunan nasional dengan daerah sehingga berjalan sesuai arahan dari Presiden melalui Menteri dan Kementrian.

Sebab daerah yang berhasil dalam pandangan pemerintah pusat adalah mereka mampu bersinergi dengan program pembangunan nasional.

Sementara beberapa kader Partai Nasdem menilai sosok Syamsul Bahri adalah seorang politisi yang cukup loyal terhadap partai dan pekerjaannya.

Sebagai Sekretaris Partai Nasdem Sumsel, ia berperan penting dalam mengorganisir dan memajukan partai di wilayah tersebut.

“Syamsul Bahri yang saya kenal merupakan sosok yang mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam berorganisasi dan sangat menghargai perbedaan pendapat serta luwes atau fleksibel dalam pergaulan,” terang Zain Ismed, rekan sejawat partai.

Dimana dibalik penampilan yang sederhana, dia selalu tuntas dalam melaksanakan tugas serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang m u m p u n i .

•RDR





“Kalau untuk poros baru sangat memungkinkan, apalagi ada empat nama capres. Tapi secara pengamatan politik, itu tidak mungkin. Karena jika ada 4 pasangan, kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan meski biaya Pemilu akan lebih besar”

Permana

SOSOK 3 CAPRES DI MATA KADER DAERAH

Sosok tiga calon presiden (capres) yang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing di mata para kader partai.

Di daerah, ada pandangan berbeda dari para kader partai terhadap sosok Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Para kader-kader hingga calon legislatif (caleg) partai juga sudah menyuarakan capres yang diusung ke kalangan masyarakat, mulai dari rekam jejak positif para capres hingga program apa saja yang bisa membuat masyarakat jatuh cinta dengan capresnya.

Ketua Kota Palembang Relawan Jaringan untuk Rakyat Ganjar Nasional (Juragan) Rizky Pratama Saputra bersama kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan sudah menyuarakan program-program yang disampaikan ke masyarakat.

Caleg daerah pemilihan (dapil) VI wilayah Kertapati, Jakabaring dan Seberang Ulu (SU) I Palembang ini berkata, berdasarkan hasil survey dari lembaga survei di Indonesia, Ganjar

Pranowo menempatkan ranking pertama dari beberapa capres.

“Sekarang kita menunggu instruksi dari Ketua Relawan Nasional, menggerakkan sosialisasi tentang stiker dan program Ganjar Pranowo. Program Ganjar yang disampaikannya pada saat nanti ketika mendaf-tarkan diri bersama calon wakil presiden (cawapres) dan akan meneruskan program Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

Di matanya, sosok Prabowo Subianto sendiri nilainya merupakan pribadi yang otoriter.

Indonesia sendiri membutuhkan pemimpin yang tidak otoriter. Karena Indonesia sudah pernah dipimpin oleh kepala negara yang diktator selama 33 tahun.

Ke depannya, dia tidak ingin Indonesia dipimpin lagi dengan presiden yang bersifat otoriter.

Karena, kebebasan demokrasi di Indonesia akan terbeleng-gu,

seperti kebebasan pers, kebebasan mengemukakan pendapat dan lainnya. Jika pemimpin bersifat seperti itu, akan menjadi bom waktu seperti saat Soeharto dilengserkan oleh masyarakat di tahun 1997-1998.

Lalu sosok Anies Baswedan dinilainya kurang pas menjadi seorang pemimpin negara, karena pengalaman jadi Gubernur DKI Jakarta lalu, banyak program yang belum dijalankan.

Anies Baswedan juga dinilai gagal menjadi Menteri Pendidikan, sehingga di-resuffle karena tidak bisa membawa pendidikan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia.

Isu agama juga melekat di pencitraan Anies Baswedan dan hal itu seharusnya tidak digunakan dalam berbagai kontes-tasi Pemilihan Umum (Pemilu). Karena isu agama sangat berbahaya dan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Ganjar dan Prabowo

Jika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo Subianto, akan ada penetralitas pemimpin, apalagi Ganjar Pranowo disukai kaum milenial.

Ketika Ganjar dan Prabowo bergabung, tergantung kebijakan dari partai koalisi yang menentukan. Mereka siap apapun yang diperintahkan oleh partai koalisi termasuk menyatukan pemerintahan otoriter dan demokrasi.

“Dia (Ganjar Pranowo) sangat terbuka dan untuk semua kalangan, demokrasi-nya terbuka.

Orangnya tidak emosional, santun, peduli lingkungan dan permasalahan di masyarakat. Dia sangat tangguh saat memimpin Jateng. Mungkin Ganjar Pranowo adalah

penerus dari Jokowi,” ucapnya.

Namun dia tidak mendukung jika Ganjar Pranowo disandingkan dengan Anies Baswedan, walaupun Anies Baswedan sudah menggandeng Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan nama Cak Imin.

Ketua Bidang Media DPW Partai Perindo Sumsel Sonny Kushardian yang juga caleg Partai

Perindo dapil VI Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin mengatakan, Partai Perindo mempunyai visi misi dan ideologi yang sesuai dengan capres yang diusung.

Untuk merebut hati masyarakat, beberapa program yang sudah dijalankan menysar ekonomi kerakyatan dan kesehatan. Mulai dari pembinaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), berobat gratis, fogging, bakti sosial, sunatan massal dan lainnya.

Dia juga menilai capres Prabowo Subianto sebagai seorang negarawan yang patriotik dan orang yang baik. Namun jika disandingkan dengan Ganjar Pranowo, pasangan itu sangat cocok untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Dia juga tak menampik adanya koordinasi dengan Anies Baswedan saat pencalonan sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

“Kalau bareng Prabowo Subianto, kita mendukung. Tapi Ganjar Pranowo lebih cocok jadi

capres, karena usia yang muda, energik sedangkan usia Prabowo Subianto lebih tua dan tidak lagi energik untuk melakukan berbagai aktivitas kenegaraan,” ucapnya.

Peluang Poros Baru

Berbeda disampaikan Suardi, kader Partai Golkar yang juga menyalonkan diri sebagai caleg di Dapil Sumsel 3 daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Ogan Ilir dan OKI Sumsel.

Dia malah lebih mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian untuk jadi Capres.

Apalagi ada permohonan ke

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk batas usia capres di bawah 72 tahun. Jika diloloskan, berkemungkinan Prabowo Subianto tidak lolos dalam syarat utama capres.

“Jadi cawapres juga tidak masalah. Saya secara pribadi masih mengunggulkan ketua saya tapi apapun perintah partai saya, tetap mengikutinya,” ungkap Wakil Ketua 1 Sayap Partai (Wirakarya) Partai Golkar Sumsel ini.

Dia pun mempunyai pandangan sendiri tentang sosok Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua capres tersebut belum terlihat keunggulannya, walau sudah menjabat sebagai Menhan dan Gubernur Jateng.

Kinerja Prabowo Subianto menjadi Menhan dan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng, belum terlihat keunggulannya. Terlebih Ganjar Pranowo yang belum mampu meningkatkan angka perekonomian di Jateng.

Begitu juga dengan Prabowo di Menhan, keamanan di Indonesia dirasanya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi pencuat penggusuran masyarakat di Pulau Rempang Batam jelang Pemilu 2024 mendatang.

Aktifis 1998 ini juga menilai sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terlalu bagus. Baik dalam meningkatkan ekonomi maupun pembangunan di ibu kota. Ditambah lagi banyak isu agama yang dimainkan oleh rombongan Anies Baswedan.

Pengamat Kebijakan Publik Sumsel Permana menuturkan, sampai saat ini masih adanya tarik-menarik antar-capres.

Apalagi yang sudah mendeklarasikan diri, belum tentu diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik pasangan Anies Baswedan-Cak Imin yang sudah deklarasi maupun yang belum menemukan pasangannya.

Namun diprediksi Pilpres 2024 mendatang tidak mengkhawatirkan seperti di Pilpres 2019 lalu. Tidak ada lagi namanya ‘cebong’ dan ‘kampret’ dan masyarakat saat ini sudah berpikir secara nalar sehat.

“Kalau untuk poros baru sangat memungkinkan, apalagi ada empat nama capres. Tapi secara pengamatan politik, itu tidak mungkin. Karena jika ada 4 pasangan, kemungkinan terjadi dua putaran pemilihan meski biaya Pemilu akan lebih besar,” ujarnya. ●RDR



“Pemilih yang akan atau telah pindah memilih keluar negeri dapat langsung datang ke KPU kabupaten kota, PPK, PPS daerah asal atau PPLN (Panitia Pemilih Luar negeri) daerah tujuan”

Massuryati



MENDENGAR ASPIRASI DEMOKRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Meski bekerja di luar negeri namun pekerja migran Indonesia juga memiliki hak suara yang sama dalam menentukan pilihan di Pemilu 2024. Secara umum pelaksanaan demokrasi di luar negeri tidak ada masalah karena semua sudah dikoordinir Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di luar negeri.

Namun ada banyak harapan yang disampaikan para pekerja migran di Pemilu 2024 terutama pada Presiden RI kedelapan nanti.

Pekerja Migran Hongkong Ency mengungkapkan Pemilu Indonesia tetap bisa dijalankannya di Negara Hongkong selama dia bekerja. Ketika itu Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 di era Joko Widodo sebagai capres dan Maruf Amin sebagai cawapres.

“Pemilihan di Hongkong bisa kok, saat itu pemilihan Presiden Jokowi saya bisa nyoblos,” kata dia.

Ency berkata dia sudah bekerja selama 6 ta-

hun di Hongkong sebagai pengasuh balita dan telah berganti majikan berkali-kali.

Dia bercerita proses hingga bisa mencoblos di dapatkannya bukan dari undangan. Setiap kali akhir pekan para pekerja migran di Indonesia piknik atau berkumpul di suatu tempat untuk bertemu teman sejawat dan ngobrol santai.

“Ada orang yang mendatangi kami dan bertanya apakah sudah mendaftar untuk mencoblos presiden. Tetapi saya tidak tahu jelas itu petugas dari kedutaan atau panitia Pemilu yang jelas sama orang Indonesia juga. Lalu saya daftar disuruh menuliskan nama, nomor telepon dan nomor KTP Hongkong,” jelasnya.

Selanjutnya bekelang beberapa hari Ency mendapatkan SMS untuk berkumpul dan melakukan pencoblosan. Ketika datang disana sudah ada ratusan migran di Hongkong lainnya untuk melakukan pencoblosan.

“Ramai sekali kita antri dan mencoblos ada sekitar 300 orang. Setelah itu saya pulang dari pencoblosan, sama seperti di Indonesia tangan kita juga dikasih tinta,” jelasnya.

Di Pemilu 2024 ini, Ency juga akan menyalurkan hak suaranya untuk ikut menentukan Presiden Indonesia.

Dia juga kembali akan mendatangi tempat liburan migran di Hongkong untuk mendapatkan

gan via SMS lagi.

“Harapan saya untuk Presiden yang terpilih nanti bisa mengayomi kami para pekerja migran di luar negeri. Seperti tidak dipersulit apabila ingin pulang dan apabila ada kasus disini kami dilindungi,” harap dia.

Namun cerita pekerja Migran Hongkong Rosy berbeda dari Ency. Dia mengaku juga mencoblos di Pilpres tahun 2019 dengan langsung mendapatkan undangan via SMS dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI.

“Informasi Pilpres dari televisi terus untuk mencoblos dapat undangan lewat SMS dari KJRI. Kalau kerja di Hongkong saya sudah 7 tahun,” kata Rosy.

Rosy menjelaskan, ketika mencoblos di Hongkong lebih susah dibandingkan mencoblos di Indonesia karena banyak migran Hongkong asal Indonesia berkumpul di satu tempat.

“Cara nyoblosnya sama seperti di Indonesia ada bilik dan sebagainya. Bedanya disini lebih susah pengawasannya lebih ketat terus antriannya bisa sehari penuh karena ramai sekali,” pungkasnya.

Cerita lain disampaikan pekerja Migran Taiwan Merry yang mengaku dia tidak bisa mencoblos di Pilpres tahun 2019 lalu. Diduga dia tidak terdaftar sebagai pemilih di negara tempatnya bekerja.

Hal itu karena data dirinya masih terdata di Indramayu, Jawa Barat. Ketika Pilpres dia mendapatkan kabar dari rumahnya ada un-

dangan mencoblos.

“Tentunya saya tidak bisa untuk pulang dan akhirnya tidak mencoblos,” kata Merry.

Merry juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Dia menyebutkan saat itu dia bekerja sebagai Migran di Singapura dan sekarang dia pindah ke Taiwan.

“Saya juga tidak tahu penyebabnya apa bisa data saya masih ada di Indonesia. Saya sudah kerja hampir 9 tahun di luar negeri. Saat pemilihan itu saya di Singapura dan sekarang kerja di Taiwan baru 2 tahun,” jelasnya.

Dia berharap Pilpres pada Pemilu 2023 bisa memilih dan mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

“Untuk Presiden nanti yang terpilih harapan kami para pekerja di luar negeri pasti sama minta lebih diperhatikan lagi. Karena kalau ada masalah apapun pastinya kita membutuhkan bantuan dari negara sendiri (Indonesia) tidak mungkin minta bantuannya dari negara disini (Taiwan),” harapnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati mengatakan, pekerja migran di luar negeri untuk mendapatkan hak suara harus mengajukan pindah memilih dari yang semula di Indonesia kemudian pindah keluar negeri.

“Pemilih yang akan atau telah pindah memilih keluar negeri dapat langsung datang ke KPU kabupaten kota, PPK, PPS daerah asal atau PPLN (Panitia Pemilih Luar negeri) daerah tujuan. Sementara untuk metode pemungutan suaranya dapat melalui pemungutan suara di TPS LN, pemungutan suara melalui kotak suara keliling dan pemungutan suara melalui pos,” jelasnya.

Dijelaskannya untuk pengawasan pemilu di luar negeri sendiri dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri.

“Selanjutnya disebut Panwaslu luar negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri,” pungkasnya.

•RDR





“Harus ada yang naik ke atas (ke parlemen) dan menjadi jembatan, mengakomodir komunitas, terutama yang masih termarjinalkan”

Dina Aryani

INFO
DAPIL

Minggu IV • September 2023

15

SUARA KOMUNITAS UNTUK PRESIDEN KEDELAPAN

Ada banyak harapan dari masyarakat Indonesia kepada calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif di Pemilu 2024. Pemenang Pemilu 2024 diharapkan bisa membawa perubahan yang menguntungkan bagi masyarakat.

Masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas di Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi dan harapannya untuk presiden kedelapan yang bisa mengubah hal-hal yang tidak pernah dilirik atau terabaikan.

Dari basis ekonomi, ada banyak keresahan yang dialami oleh para pengemudi ojek online yang menaruh harapan perubahan yang akan dilakukan presiden kedelapan nantinya untuk mengubah nasib mereka.

Darmawan (43), mantan Ketua dan anggota Driver Ojek Online Masjid (DOOM) Palembang menyampaikan aspirasinya agar bisa didengar oleh pemerintah ke depan.

Menurutnya, kondisi perekonomian pengemudi ojol saat ini jauh dari kata layak. Perubahan kebijakan dari perusahaan transportasi online membuat para pengemudi ojol yang menggantungkan nasibnya di menjadi kebingungan dengan masa depannya nanti.

Kebijakan baru dari perusahaan transportasi online membuat penghasilan mereka jauh dari kata layak. Biasanya, para pengemudi ojol di Palembang bisa mendapatkan Rp300-500 ribu per harinya. Bahkan, ada yang rela meninggalkan pekerjaan dengan gaji di atas UMR Sumsel demi menjadi pengemudi ojol dengan penghasilan yang menggiurkan.

Dengan kebijakan baru tersebut, para pengemudi ojol kini hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp30-50 ribu per hari yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tengah kesulitan mendapatkan penghasilan yang layak, pekerjaan sebagai ojol juga berisiko tinggi dan mengancam keselamatan. Ditambah lagi persaingan yang sudah tidak sehat antar-perusahaan jasa transportasi online membuat para ojol menjerit.

“Kami berharap kepada kepala negara ke depan yang terpilih, harus lebih memikirkan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah harus lebih dipertegas, terutama untuk perusahaan jasa transportasi online. Jangan sampai, usaha kami untuk mengais rezeki jadi sia-sia dengan

tidak adanya perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Aspirasi juga disampaikan oleh komunitas olahraga sepakbola yang berharap ada keseriusan dari pemerintah untuk membenahi sistem pengelolaan sepakbola Indonesia.

Dewan Pembina Singamania, fansclub Sriwijaya FC (SFC), Ariyadi Eko Neori, menuturkan, pemerintah ke depan harus lebih tegas dalam menuntaskan mafia bola. Apalagi, dia melihat sendiri adanya indikasi mafia bola saat Sriwijaya FC berlaga di Liga 2 di Bali pada 2019.

Mafia bola dirasakannya sangat menghambat perkembangan persepakbolaan Indonesia. Diduga adanya settingan pemenang di setiap laga di Liga Indonesia yang sangat menghantui para pemain sepakbola dan pendukungnya.

“Kasih para pemain sepakbola, latihan tiap hari, capek, akhirnya wasit sudah menentukan siapa yang menang karena mafia bola, bukan karena hasil pertandingan. Kami juga sebagai pendukung tim bola sangat kecewa dengan ketidaktegasan dalam menuntaskan mafia bola. Presiden terpilih nanti harus benar-benar serius menghapus jaringan mafia bola ini,” ucapnya.

Wadah Pelaku Seni

Hal senada juga disampaikan Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Palembang, Masagus Leonard Arief (47). Dia mengatakan, anggota KPJ bukan murni gambel seperti pandangan orang-orang. Walau penyanyi jalanan, banyak yang sudah berkarir di berbagai bidang dengan jabatan penting dan pendidikan tinggi.

Ada banyak yang ingin disampaikan ke pemerintah agar komunitas-komunitas seperti mereka bisa berkembang dan tidak ada lagi diskriminasi. Pemerintah daerah

saat ini diakuinya sudah memberi ruang untuk mereka berkarya. Namun, ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, seperti keterbatasan ruang publik untuk berkarya.

“Ruang publik untuk kita berekspresi terbatas, kalau kita di jalan seolah bikin resah. Kita termasuk kaum termarjinalkan dan ingin keluar dari kata termarjinalkan. Karya kami termarjinalkan karena belum tahu tempatnya untuk menampung karya seni kami. Harusnya diberi spot untuk berkarya. Jangan ada lagi para pengamen diusir atau dikejar-kejar instansi pemerintah saat mengamen,” katanya.

Salah satu ruang berkarya yang diharapkan seperti pasar seni yang strategis, yang bisa menjadi tempat para pengamen jalanan berkarya dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang kerap dialami oleh pengamen jalanan.

Untuk presiden terpilih nantinya, Loedy berharap akan banyak program kebudayaan yang bisa menggandeng pengamen jalanan untuk berkarya. Karena pekerja seni di tiap daerah adalah aset negara.

“Kesenian dan kebudayaan harus menjadi aset yang sangat bisa menguntungkan. Pelaku seni adalah

aset yang bisa menambah income daerah, lebih diberdayakan dan

dilindungi hak kesenian dan kebudayaan, karena saat ini belum ideal,” ungkapnya.

Dina Aryani merasakan keresahan para komunitas di Sumsel. Sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Dapil 2 DPRD Palembang yang juga anggota KPJ Palembang berujar, sudah banyak perubahan dari pemerintah yang lebih memperhatikan para seniman Palembang walaupun belum maksimal.

Dina Tanjung, sapaannya mengakui, banyak karya seni para seniman di Palembang yang tidak kalah berkualitas dari karya seni daerah lain. Namun, harus ada wadah dan peluang yang lebih besar diberikan ke para musisi dan pelaku usaha lainnya di Palembang agar bisa berkembang.

“Kalau secara global, pemerintah harus terus melakukan perbaikan. Tak hanya dari segi seni, tapi dalam hal kesejahteraan, perekonomian dan pendidikan. Tiga pilar pokok itu yang harus kita bereskan. Jika tiga pilar itu sudah berjalan menuju ke arah yang lebih baik, nanti seni dan budaya akan mengikuti,” ucapnya.

Mantan penyiar radio yang kini menjabat sebagai manager marketing perusahaan air mineral kemasan ini pun ingin menjadi perantara aspirasi komunitas jika terpilih menjadi anggota dewan di Pileg 2024. Seperti memberikan ruang dan kesempatan bagi para pelaku seni atau pelaku usaha lainnya tanpa menunggu momen-momen penting.

“Harus ada yang naik ke atas (ke parlemen) dan menjadi jembatan, mengakomodir komunitas, terutama yang masih termarjinalkan. Bagaimana teman-teman dari berbagai komunitas yang perekonomiannya masih di bawah, bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri,” ujarnya.

Dia juga terus menyemangati para pegiat komunitas di Sumsel agar tidak berhenti berkarya dengan segala keterbatasan. Dia mencontohkan pengalamannya yang bisa menyelesaikan kuliah S-1 di Stisipol Candradimuka Palembang dari hasil mengamen pada 1999. •RDR



“MK hanya memperbolehkan bukan diharuskan kampanye di kampus. Kalau seandainya pihak kampus menolak mereka tidak boleh kampanye. Sama seperti kita melakukan kegiatan harus izin tempat”

Amrah Muslimin



KAMPUS TOLAK KAMPANYE DI KAMPUS

Wacana Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampus atau Universitas menjadi lokasi kampanye Pemilu 2024 sepertinya tidak akan terlaksana di Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu disebutkan akan mengganggu ketentraman civitas akademika yang khusus dalam melakukan proses belajar mengajar. Terlebih lagi nilai independensi dunia pendidikan dinilai akan tercoreng oleh politik praktis.

Wakil Rektor (WR) III Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Mukhtarudin Muchsiri mengatakan, pihaknya menolak karena tidak ingin mahasiswa dan mahasiswi UMP ikut terlibat dalam dunia politik.

“Tentunya sangat mengganggu kalau ada praktek kampanye seperti itu sampai digelar di kampus. Pastinya mengganggu mahasiswa, mahasiswi dan dosen untuk belajar. Bagaimana waktu mereka harus belajar bukan untuk ikut kegiatan kampanye yang dilakukan partai politik atau calon,” kata dia.

Diakukannya keputusan UMP tegas menolak adanya kampanye masuk kampus sangat jelas. Dimana berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi Muhammadiyah pusat juga memberikan arahan untuk melakukan penolakan.

“UMP adalah amal usaha dari Muhammadiyah kita tentunya juga menjalankan perintah dari Muhammadiyah. Kami sudah mendapatkan surat edaran dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolaknya,” tegasnya.

Menurutnya mahasiswa dan mahasiswi adalah kaum muda dan generasi

bangsa yang harus diberikan edukasi di kampus. Kondisi itu menjadi beban universitas memberikan asupan yang berkualitas kepada para mahasiswa dan mahasiswinya.

“Jadi begini mahasiswa dan mahasiswi itu tugasnya belajar. Mereka juga masih labil karena berjiwa muda orang yang sudah dewasa saja kalau berpolitik terpecah belah. Kami tidak mau adanya kampanye bisa membuat mahasiswa dan mahasiswi kami ikut berkonflik sesama mahasiswa nantinya,” jelasnya.

Penolakan itu juga terjadi di Universitas Sriwijaya (Unsri), meskipun mereka tidak melakukan penolakan keras seperti yang dilakukan UMP. Pihak UNSRI tidak akan memberikan izin kepada partai politik (Parpol), kader partai dan para calon Pemilu 2024 menginjak kakinya di kampus Unsri.

Humas Universitas Sriwijaya (Unsri) Arief Alkahfi mengatakan, secara jelas pihaknya belum melakukan rapat dan keputusan pasti untuk menolak.

Tetapi secara tegas tidak akan memberikan ruang untuk kampusnya dijadikan tempat kampanye.

“Tidak ada keputusan karena masih tahun depan Pemilu jadi kami belum ada rapat. Tetapi jelas untuk kam-

panye di kampus tidak bisa sembarangan,” jelasnya.

Arief menilai apabila pihak Parpol melayangkan surat izin tempat perhal kampanye di Unsri dia tidak melarang. Apabila ada Parpol yang memiliki niat untuk berkampanye.

“Kalau mau memasukan surat izin tempat kampanye di kampus silahkan saja. Tetapi tentunya tidak belum tentu kami izinkan. Kalau mereka mau kampanye di luar kampus kami persilahkan. Kalau di dalam kampus tidak bisa,” tegasnya.

Kondisi itu juga dinyatakan oleh Universitas Sumatera Selatan (USS) tidak secara terang-terangan menolak. Namun secara teknik sepertinya tipis-tipis ikut melakukan penolakan namun tidak berani secara tegas.

Wakil Rektor (WK) II Universitas Sumatera Selatan (USS) Rabin Ibnu Zainal menyatakan, secara pribadi menolak adanya praktek politik praktis ada di kampusnya.

“Secara pribadi saya menolak,” tegasnya.

Namun dia menuturkan apakah diperbolehkan atau tidak pihaknya

masih dalam proses pembahasan. Karena apabila MK sudah memberikan izin mereka khawatir akan bermasalah kedepannya.

“Karena sudah ada keputusan MK artinya sudah ada aturan dan patokannya. Kami akan bincangkan dahulu keputusan pastinya nanti. Soalnya masih satu tahun lagi dan akan kita rapatkan dulu,” jelasnya.

Menurutnya pihaknya bisa saja nantinya memberikan izin namun dengan beragam catatan besar yang harus diikuti oleh Parpol ingin berkampanye di kampusnya.

“Saya belum baca jelas aturan dari MK, namun asal mereka kampanye tidak berpolitik dan masih bersifat edukasi kemungkinan kami persilahkan. Intinya kami masih pelajari terlebih dahulu tahunnya nanti ada kesalahan kedepannya,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Amrah Muslimin menyatakan, keputusan MK itu mutlak sama seperti bisa mengharamkan sesuatu yang halal.

Namun meskipun kampanye di kampus sudah halal alias diperbolehkan oleh MK tetapi sifatnya tidak mutlak. Kondisi itu disebutkan hanya memperbolehkan bukan juga keharusan.

“MK hanya memperbolehkan bukan diharuskan kampanye di kampus. Kalau seandainya pihak kampus menolak mereka tidak boleh kampanye. Sama seperti kita melakukan kegiatan harus izin tempat. Seandainya tempat itu tidak memberikan izin yang tidak boleh,” tegasnya. ●RDR





“Kita ingin mencari pemimpin sejati yang sudah ditempa dalam pergulatan dalam menyelesaikan masalah ekonomi”

Yulian Junaidi

INFO
DAPIL

Minggu IV • September 2023

17

ADA MASALAH PENTING UNTUK PEMIMPIN SEKARANG DAN NANTI

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai ancaman kerusakan lingkungan kerap terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang, tanah longsor hingga alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan.

Di Sumatera Selatan yang menjadi sorotan penting adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus-menerus menghantui masyarakat Sumsel. Dampak dari Karhutla pun mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk perekonomian dan kesehatan.

Pengamat lingkungan dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Yulian Junaidi mengatakan, persoalan mendasar yang tidak diatasi di Sumsel adalah tata guna lahan.

Banyak wilayah yang seharusnya tidak digunakan, namun dibuka untuk kepentingan personal dan perusahaan. Seperti kawasan gambut dan lahan-lahan yang terlantar menjadi lokasi Karhutla.

“Lalu soal sosial dan partisipasi masyarakat. Banyak program-program seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kurang partisipatif ke masyarakat. Mereka hanya melihat persoalan yang didesain dari atas saja. Dirumuskan oleh mereka yang ada di perkotaan, ahli di perkotaan yang tidak memahami di pedesaan, adanya orang-orang kuat yang sering mengambil kesempatan di tengah pembangunan sekarang,” ucapnya.

Mereka biasanya bekerja sama dengan pelaku pembangunan, termasuk pelaku ekonomi yang berinvestasi di pedesaan. Jika ada upaya membangun ekonomi dan menyelesaikan kemiskinan di pedesaan, itu hampir tidak pernah terjadi.

Dia melihat Karhutla di Sumsel tidak mungkin karena faktor alam, pasti sumber apinya dari manusia. Namun persoalan ini tidak bisa dilihat per orang saja, tapi dilihat dari kesalahan suatu sistemnya.

Hal tersebut berkaitan dengan tata kelola, perencanaan, kepemilikan dan problem yang ada di sekitar lahan. Ada juga problem kemiskinan dan pembangunan yang bias dengan perkotaan.

“Di tengah kemiskinan masyarakat, ada entropi sosial yakni satu problem sosial yang dipicu aspek psikologis, ekonomi,

ekologi dan aspek kultural. Misalnya aspek psikologis, kehadiran investasi yang menimbulkan kesenjangan, investasi tidak berdampak bagi kaum miskin, kecemburuan sosial yang akhirnya memicu tindakan iseng, seperti melempar puntung rokok dan lainnya,” ucapnya.

Kutukan Sumber Daya Alam

Beberapa dugaan, pihak perusahaanlah yang membakarnya karena kebakaran hutan adalah cara yang paling murah untuk membuka lahan. Tidak harus menggunakan alat berat, penebangan, menebar pestisida untuk membunuh rumput-rumput, cukup dengan korek api saja.

“Karhutla pasti akan terjadi jika sistem tidak benar dan selama ini mengatasi masalahnya dengan cara parsial, karena adanya sistem yang salah. Sistem ini bisa saja sistem yang tidak adil dan tidak taat pada prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Sistem inilah yang harus dikelola dengan baik, tidak cukup dengan tangkap sana sini, tidak cukup dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Penyelesaiannya harus tematik, holistik, integratif dan sistemik,” ujarnya.

Dia juga sulit berharap pada politisi, karena hanya menampilkan gimmick politik yang seolah peduli lingkungan dan kemiskinan.

Masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang

bersungguh-sungguh mengatasi problem tersebut. Karena dampaknya sangat besar, termasuk soal sosial, ekonomi dan

kesehatan.

“Harus diuji dulu komitmen dari calon-calon presiden, ditelusuri track record-nya, ada tidak peduli lingkungan, apakah dia punya gagasan yang sejati menjadi bagian dari komitmen pribadi dia. Kita ingin mencari pemimpin sejati yang sudah ditempa dalam pergulatan dalam menyelesaikan masalah ekonomi,” ujarnya.

Presiden ke-8 nantinya diharapkan punya perhatian juga terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti tingkat pendidikan, kemampuan untuk mengelola SDA. Kualitas itulah yang perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal dan nonformal. SDA yang berlimpah akan jadi sia-sia, sehingga itu bisa menjadi kutukan SDA atau Natural Resource Curse.

Koordinator Perkumpulan Sumsel Bersih Lestari Sumarlan menuturkan, Karhutla di Sumsel merupakan bentuk kegagalan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selama lebih dari sembilan tahun, terutama di lahan gambut di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sumsel. Walau dana sudah banyak digelontorkan untuk pencegahan Karhutla, tapi masih saja terus terjadi.

“Program pencegahan karhutla itu hasilnya tidak maksimal. Presiden Joko Widodo harusnya mengevaluasi KLHK. Karena dinilai gagal dalam mencegah karhutla. Terindikasi adanya oknum-oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan untuk membuka lahan pertanian dengan cara instan,” ucapnya.

Dari data yang saya dapatkan, sebaran hotspot dan fire spot Sumsel per 1-8 September 2023 ada sebanyak 64 persen hotspot di gambut dalam konsesi

perkebunan.

Dari total 370 titik hotspot di Sumsel, 200 titik berada di lahan gambut dan terindikasi kuat 64 persen-nya atau 127 titik hotspot di lahan gambut berada di dalam konsesi perkebunan.

Bahkan di tanggal 15-16 September 2023, polusi udara di Palembang sangat tidak sehat. Terindikasi kuat akibat karhutla yang mengakibatkan kondisi udara di Palembang terparah se-Indonesia. Apalagi banyak masyarakat Palembang yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Tugas Berat Presiden Terpilih

Dulu Presiden Joko Widodo sudah tegas mencabut izin perusahaan yang lahannya terbakar. Tapi kenapa ketegasan Joko Widodo tersebut seolah tidak membuat jera dan takut kepada para perusahaan lainnya, sehingga masih terjadinya kebakaran di areal izin perusahaan.

Selain kelalaian dari KLHK, Pemprov Sumsel juga turut lalai dalam pencegahan Karhutla, sehingga kembali terjadi karhutla yang berulang kali. Kemungkinan ada kebijakan yang salah dari Presiden Joko Widodo dalam mengatasi permasalahan ini.

M Hairul Sobri, calon legislatif (caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) 2 OKU Timur Sumsel menuturkan, Presiden RI ke-8 harus memperhatikan Sumsel yang provinsi dengan luasan lahan gambut hingga 1 juta hektare, yang memiliki simpanan karbon yang tinggi untuk menekan perubahan iklim dan pemanasan global.

Bentuk salah urus gambut akan berdampak pada bencana ekologis, kepungan asap maupun ancaman banjir.

Lalu tugas berat Presiden ke-8 adalah mengurangi izin-izin pertambangan di Sumsel yang selama ini diabaikan pemerintah. Di Sumsel sendiri, pertambangan telah memperluas peta bencana seperti meluasnya wilayah rawan longsor, banjir bandang serta pencemaran udara, sungai dan sumber-sumber kehidupan lainnya.

Bahkan dampak pertambangan di Sumsel juga menjadi salah satu alasan harimau atau hewan buas yang ada di hutan-hutan keluar menyerang manusia.

“Industri hutan tanaman atau kebun kayu maupun perkebunan sawit menjadi mayoritas industri yang menguasai hampir setengah luasan Sumsel. ini menjadi bagian terpenting untuk disoroti pemerintah,” ujar aktivis lingkungan ini.

Presiden RI ke-8 harus memahami paradigma konsep pengelolaan SDA untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan lingkungannya. Serta terus menurunkan pemahaman konsep pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan sampai di tingkatan pemerintah daerah. ●RDR



“Tapi saya percaya, setiap jajaran Kejaksaan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar. Jadi pasti tidak akan mudah terhasut oleh hal-hal haram semacam itu”

Ahmad Sahroni



KEJAKSAAN BUKAN ALAT POLITIK

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke anak buahnya. Dalam sidak menjelang Pemilu 2024, dia menegaskan lembaganya bukanlah alat politik.

Jaksa Agung melakukan sidak ke Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata usaha Negara, serta Bidang Tindak Pidana Khusus pada 13 dan 14 September 2023. Burhanuddin menjelaskan para penegak hukum harus tetap bekerja fokus di tengah hiruk pikuk proses demokratisasi dan politik Indonesia.

“Sebab, kita bukan alat politik, tetapi kita adalah penegak hukum, yang tujuannya menuntaskan segala persoalan hukum di negeri ini,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, sidak tersebut bertujuan memastikan sarana dan prasarana peralatan di Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono. Bidang ini disebutnya akan menjadi primadona penegakan hukum, karena tidak semua harus berujung ke

pengadilan. Ke depan, tren proses hukum akan mengarah ke nonlitigasi.

Sidak juga mengarah ke Bidang Tindak Pidana Khusus yang diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Jaksa Agung menegaskan agar jangan ada campur tangan politik dalam penegakan hukum.

“Asalkan kita tegas, profesional, dan independen dalam penegakan hukum, maka masyarakat akan menilai kinerja kita. Tetap fokus dengan upaya-upaya pengembalian keuangan negara. Penegakan hukum jangan sampai kendor, dan teruslah berkarya untuk Indonesia terbebas dari korupsi,” ujar Jaksa Agung.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengingatkan Kejaksaan Agung agar tetap netral dan profesional dengan tidak menjadi alat politik dalam menghadapi eskalasi dinamika politik jelang Pemilu 2024.

“Menjelang 2024 ini, sudah dipastikan tensi politik akan meningkat. Namun, hal tersebut sama sekali tidak boleh mempengaruhi kinerja Kejaksaan. Terutama di level

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang benar-benar langsung bersinggungan dengan dinamika di lapangan. Kejagung harus kuat iman tak jadi alat politik,” kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

Hal tersebut, kata Sahroni, sebagaimana pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengingatkan para jajarannya bahwa tugas kejaksaan ialah sebagai penegak hukum dan bukan alat politik. Untuk itu, Sahroni juga meminta seluruh jajaran kejaksaan tetap berpaku pada arahan dari Jaksa Agung, menyaoal akan ada saja oknum-oknum yang berusaha mendekati jajaran kejaksaan di berbagai tingkatan.

“Tak bisa dipungkiri, pasti akan ada saja oknum-oknum yang berusaha mendekati aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan. Ini berlaku di jajaran level bawah sampai level atas. Untuk itu, saya minta semuanya ikuti arahan dari Jaksa Agung, jangan ada yang coba campurkan penegakan hukum dengan politik. Jaksa Agung pasti tidak akan mentoleransi hal-hal semacam itu,” tuturnya.

Meski demikian, Sahroni optimistis bahwa seluruh insan Korps Adhyaksa memiliki integritas yang tidak akan mampu ditawar. Sehingga, ia meyakini kasus demikian memiliki peluang rendah untuk terjadi.

“Tapi saya percaya, setiap jajaran Kejaksaan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar. Jadi pasti tidak

akan mudah terhasut oleh hal-hal haram semacam itu,” ucap Sahroni.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, juga menyatakan Kejagung sudah memberikan arahan kepada jaksa di daerah untuk cermat dalam penanganan perkara korupsi menjelang Pemilu 2024 agar tidak berpolemik.

“Kami sudah memberikan arahan kepada daerah tidak akan menimbulkan polemik,” kata Ketut.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu meyakini instruksi Jaksa Agung kepada jajaran jaksa untuk menunda pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap para calon peserta pemilu sejak resmi ditetapkan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah sampai seluruh rangkaian proses tahapan pemilihan selesai bukan untuk menghentikan penuntasan perkara korupsi, tetapi untuk melindungi sementara jaksa maupun institusi Kejaksaan dijadikan sebagai terperiksa atau menjadi black campaign.

“Justru kami tidak mau menjadi terperiksa, menjadi black campaign,” ujarnya.

Jaksa Agung menginstruksikan jajaran jaksa, terutama yang bertugas bidang intelijen dan tindak pidana khusus, untuk cermat dan berhati-hati saat menerima dan menangani aduan korupsi yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam instruksi yang sama, Burhanuddin juga meminta jaksa berhati-hati menerima dan menangani laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah demi mengantisipasi adanya black campaign kepada mereka menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk menunda pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap mereka sejak para calon itu resmi ditetapkan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah sampai seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan selesai.

Jaksa Agung menjelaskan, memasuki tahun politik institusi Kejaksaan rawan menjadi alat yang dipergunakan untuk menyerang calon-calon tertentu.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan perlunya kehati-hatian mencegah ada kampanye hitam terselubung.

Jaksa Agung juga mengingatkan jajaran Kejaksaan netral dan tidak memihak salah satu calon. ●RDO





“Karena masih menggunakan surat suara, harus dimitigasi terkait ketersediaan kertas”

Herwyn J Malonda

PILKADA DIMAJUKAN, TITO SEMAKIN BERKUASA

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perppu tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang tadinya digelar November, diusulkan menjadi September.

Mendagri Tito menjelaskan enam poin yang disesuaikan dan diusulkan pemerintah dalam Perppu Pilkada tersebut. Pertama, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Kedua, memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024. “Maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada November 2024 harus disesuaikan,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu malam, 21 September 2023.

Ketiga, Perppu akan mempersingkat durasi kampanye Pilkada Serentak 2024 menjadi 30 hari saja. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Keempat, mempersingkat durasi sengketa proses Pilkada. Poin ini diusulkan guna mempertimbangkan masa kampanye selama 30 hari dan mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik Pilkada.

Kelima, kepastian hukum partai politik atau gabungannya mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah hasil Pemilu 2024. Karena, perlu ada norma yang mengatur bahwa pencalonan kepala daerah yang diusung didasarkan pada hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperhatikan ketentuan persentase sebagaimana Pasal 40 UU Pilkada.

Keenam, pelantikan serentak DPRD 2024. Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah. Artinya, manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.

Jika Perppu Percepatan Pilkada 2024 itu disetujui, perlu juga diantisipasi irisan tahapan krusial antara Pemilu dan Pilkada

2024. Termasuk potensi jika terjadi dua putaran Pilpres 2024 pada Juni tahun tersebut.

“Dengan memajukan pemungutan suara pada September 2024, maka akan mempercepat pelantikan kepala daerah terpilih tahun 2024, yaitu setidaknya 1 Januari 2025. Supaya tidak terjadi kekosongan yang masif,” ujar Tito.

Mendagri menambahkan, jika Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat pemungutan suaranya, akan ada potensi kekosongan kepala daerah di banyak daerah. Sebab, kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonomi baru di Papua yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022.

“Dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2023. Serta terdapat 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,” ujar Tito.

“Berdasarkan data ini, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif,” katanya.

“Karena, pemerintah perlu diambil langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah tersebut. Terlebih lagi, adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan penjabat (Pj).”

“Di samping tentunya legitimasi yang tentu akan lebih kuat kalau diisi oleh kepala daerah hasil Pilkada,” ujar Tito.

DPR sendiri memberikan sinyal setuju terhadap usulan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan hari pencoblosan Pilkada 2024, dari November menjadi September.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspari Gaus, menjelaskan, gagasan percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 datang dari pemerintah. Dia mengatakan, Mendagri Tito secara informal sudah menyampaikan ke Komisi II DPR keinginan untuk mempercepat Pilkada 2024.

“Jadi perubahan itu (percepatan hari pencoblosan) tentu lewat Perppu. Nah, kenapa lewat Perppu? Kalau lewat revisi UU, tentu akan memakan waktu yang lama,” jelas Guspari, Kamis, 21 September 2023.

Dia mengklaim, setiap fraksi di Komisi II DPR sudah menyetujui usulan penerbi-

tan Perppu Pilkada ini untuk memajukan hari pencoblosan yang awalnya November menjadi September 2024. “Kami sepakat dengan pemerintah dilakukan dengan mekanisme mengganti UU 10/2016 itu lewat Perppu,” ungkap Guspari.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara konstitusional keputusan untuk mengeluarkan Perppu adalah hak pemerintah dan presiden. Ia tak ingin ada persepsi yang bias dalam pengambilan keputusan.

“Justru menurut saya nanti yang bias, masa DPR menyetujui Perppu diterbitkan? Padahal kan itu haknya pemerintah. Jadi dengan kata memahami saja sebetulnya itu sudah secara tidak langsung kami menganggap kalau perlu ya monggo,” jawab Doli.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap sejumlah potensi masalah yang akan terjadi apabila pemerintah mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Setidaknya, ada dua masalah yang bisa terjadi.

Pertama, ada kemungkinan terjadi irisan tahapan akhir Pemilu 2024 dan tahapan awal Pilkada 2024. Irisan tahapan itu akan mengganggu persiapan pilkada.

“Kalau hasil pemilu sebelumnya itu berlarut-larut (sengketa), cara penyelesaiannya dalam bentuk bagaimana?” kata Komisiner Bawaslu, Herwyn J Malonda.

Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 dinyatakan apabila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara baru tuntas pada 20 Juli 2024. Itu belum menghitung kemungkinan adanya sengketa hasil pilpres putaran kedua yang bisa memakan waktu hingga Agustus 2024.

Kedua, ada potensi terjadinya masalah produksi dan distribusi logistik, terutama kurangnya stok kertas untuk mencetak surat suara. Sebab, hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 hanya berjarak sekitar tujuh bulan dengan pelaksanaan Pilkada September.

“Karena masih menggunakan surat suara, harus dimitigasi terkait ketersediaan kertas. Karena pengalaman di Pemilu 2019 yang lalu, pengadaan kertas yang digunakan di surat suara pemilu hampir tidak dapat dipenuhi,” kata Herwyn.

Meski menyampaikan sejumlah catatan atas rencana percepatan pilkada, Herwyn menegaskan lembaganya sebagai pelaksana undang-undang akan mematuhi apa pun amanat dalam Perppu Pilkada. Pernyataan serupa disampaikan oleh dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU RI dan DKPP. **•RDO**



“Hadirnya partai partai baru di Pemilu 2024 ini patut kita apresiasi karena adanya kecenderungan partisipasi demokrasi Indonesia yang cukup tinggi dan hal ini sangat baik”

Prasetya Sanjaya



PUNYA GAGASAN BARU, PARTAI PENDATANG BERPOTENSI TINGGI RAIH SUARA

Pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini tercatat ada 17 partai yang lolos. Dari jumlah itu setidaknya ada delapan partai non parlemen yang didominasi para pendatang baru. Gagasan dan ide-ide demokrasi yang ditawarkan membuat peluang partai pendatang baru ini punya kans sama.

Sebagai pendatang baru tentu ada kerja keras yang harus dilakukan para kader untuk mengenalkan ke masyarakat. Dimana ada saja yang mungkin terasa asing di sebagian masyarakat terhadap partai dan kadernya.

Namun potensi mereka untuk meraih kursi di legislatif juga terbuka lebar bila gagasan demokrasi yang ditawarkan memang menyentuh masyarakat.

Partai Buruh misalnya, mereka fokus menyuarakan aspirasi buruh untuk berperan di Pemilu 2024 mendatang. Dimana selama ini kaum buruh dianggap belum memberikan kontribusi penting dalam panggung demokrasi Indonesia.

Di sisi lain hak-hak buruh juga sering terabaikan. Dengan hadirnya Partai Buruh diharapkan derajat politik juga ikut terangkat.

Setelah sempat absen pada

pemilu 2009, akhirnya pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, Partai Buruh ini kembali berkiprah dalam politik nasional, melalui Kongres yang disepakati oleh empat konfederasi serikat pekerja dan sekitar 50 federasi serikat pekerja, forum guru dan tenaga kerja honorer serta serikat petani dan nelayan.

Saat ini partai ini telah memiliki perwakilan daerah di 34 provinsi, 514 perwakilan tingkat Kabupaten Kota, dan lebih dari 6.000 perwakilan di tingkat kecamatan.

Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan, Kemas Ali Hanafiah merasa yakin dengan eksistensi mereka menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 2024.

“Kita akan melakukan gerakan sosial secara masif seperti dari rumah ke rumah dan dari kelompok ke kelompok kecil sampai kelompok-kelompok besar. Itu yang sedang dilakukan pada saat ini,” tegasnya.

Terkait konsolidasi sendiri saat ini mereka telah melakukan semuanya mulai dari Bacaleg maupun sosialisasi secara umum

“Pada tanggal 24 Desember mendatang kita akan menggelar pertemuan umum untuk koalisi akbar dan akan dihadiri ribuan kader Partai Buruh yang akan dilaksanakan di Palembang,” ungkapnya.

Ali mengatakan, Partai Buruh sudah menjadi bagian hidupnya. Selain dibesarkan dari keluarga buruh, sebagai aktivis segmen yang diperjuangkannya juga selama ini selalu berkaitan dengan kaum marginal.

“Untuk menjaring suara di daerah kita akan menawarkan perubahan-perubahan dan memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh. Kemudian secara sp-

esifiknya kita akan melakukan pembelaan seperti memperjuangkan jaminan sosial meliputi pemutusan hubungan kerja, memperjuangkan upah, kecelakaan kerja serta mencoba membangun perekonomian buruh melalui koperasi,” tegasnya.

Koordinator Nasional Sayap Milenial Partai Buruh (Orange-B) Riza Vahlevi menyebutkan, momen pemilu 2024 menjadi ajang politiknya anak muda untuk turut berpartisipasi dalam politik. Partai politik pada dasarnya menjadi pencerah untuk alat menyadarkan masyarakat pada peran politiknya.

Partai Buruh menjadi rumah bersama bagi kalangan anak muda, selama ini mereka lihat partai politik melupakan sesuatu pencerahan kepada generasi muda, terkadang yang dilakukan tidak menyentuh generasi muda khususnya anak muda/remaja.

“Program program yang ada dalam partai politik cenderung tidak memperhatikan potensi pemilihan suara dari kalangan ini. Disinilah asal muasalnya yang menumbuhkan semangat Sayap Millennial Orange-B untuk menghimpun dan membangun kesadaran politik bagi anak muda,” kata Riza.

Partai Buruh menurut Riza menjadi alat untuk berekspresi dan menggali potensi keberpihakan sebuah partai politik terhadap kepentingan orang banyak. Plat-

form perjuangan partai ini jelas yakni mem-

perjuangkan hak-hak buruh.

Siapa Uji Gagasan

Sementara Partai Gelora lebih mengedepankan gagasan dan ide demokrasi yang lebih segar serta lebih baik. Dengan kader-kader terbaik mereka, Partai Gelora yakin akan bisa meraih suara maksimal di Sumsel dan tumbuh menjadi partai besar di Indonesia.

“Ada banyak gagasan yang kami tawarkan ke masyarakat bahkan kader-kader kami berani untuk diuji. Kader Partai Gelora juga sudah disiapkan untuk berani beradu argumen dalam berbagai hal sehingga kami yakin akan bisa diterima masyarakat di Pemilu 2024 ini,” ungkap Ketua DPW Partai Gelora, Erza Saladin.

Di Pemilu 2024 ini Partai Gelora Sumsel menargetkan meraih satu kursi di setiap Dapil baik untuk DPR RI, provinsi maupun kabupaten/ kota. Komitmen yang kuat dari seluruh kader membuat mereka optimis mencapai target tersebut.

“Kalau soal strategi tentu kami punya namun secara umum para kader terus bersosialisasi mendekati diri kepada masyarakat bahkan siap melakukan uji gagasan dengan siapapun. Kami termasuk yang paling senang untuk diajak diskusi utamanya tentang demokrasi Indonesia ke depan,” ujarnya.

Bahkan Partai Gelora juga siap menginisiasi melakukan uji gagasan sebagai bentuk bagian dari sosialisasi Bacaleg dari KPU.

Dari uji gagasan ini masyarakat akan tahu bagaimana kualitas dan wawasan wakil rakyat baik untuk DPR RI maupun DPRD provinsi yang akan mereka pilih nanti. Sehingga peran KPU dalam kegiatan ini sangat penting.

Potensi besar partai baru di Pemilu 2024 ini diakui Ketua Barisan Pemantau Pemilihan (BP2) Sumsel, Prasetya Sanjaya.

“Hadirnya partai partai baru di Pemilu 2024 ini patut kita apresiasi karena adanya kecenderungan partisipasi demokrasi Indonesia yang cukup tinggi dan hal ini sangat baik,” terangnya.

Dia melihat, baik partai baru maupun partai lama memiliki peluang yang sama untuk meraih dan mendulang suara di Pemilu 2024. Hanya saja ruang gerak mereka tidaklah seluas partai partai besar lainnya seperti PDIP, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Meski demikian dengan gagasan baru yang mereka tawarkan bukan tidak mungkin partai pendatang baru tersebut menjadi besar karena ide mereka berhasil meraih simpati rakyat. Sehingga siapapun baik lama atau baru punya peluang yang sama.

•RDR





“Jika hal itu terjadi, maka untuk kesekian kalinya PDIP akan kembali menuding PSI sebagai partai politik baru yang cukup efektif menggerogoti basis pemilih loyal PDIP di sejumlah dapil di penjurusan nusantara”

Ahmad Khoirul Umam

KAESANG JADI KETUA UMUM PSI

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dikabarkan bakal masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kabar itu berembus santer setelah akun medsos PSI mengunggah sebuah video pendek menampilkan siluet Kaesang. Bahkan, Kaesang disebut-sebut bakal menjadi ketua umum.

Seperti dikutip dari akun PSI di platform X (dahulu Twitter) dan Instagram, pada video pendek tersebut muncul narasi yang diucapkan Kaesang.

“Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar,” demikian narasi yang diakhiri dengan siluet wajah Kaesang dengan latar merah.

Kaesang diketahui memang dekat dengan PSI. Bahkan, PSI pernah memasang baliho Kaesang di Depok. Partai dengan yang kini dipimpin Giring Ganesha ini mendorong Kaesang sebagai wali kota Depok.

Apabila Kaesang bergabung dengan PSI, maka pilihannya berbeda dari sang ayah Jokowi dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kader PDIP.

Plt Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagoes Oka, tidak banyak bicara ketika ditanyai mengenai isu Kaesang akan masuk ke partai berlambang mawar itu. Dirinya juga meminta semua pihak untuk sabar menanti pengumuman penjelasan soal Kaesang yang akan diangkat menjadi ketua umum.

“Sampai saat ini infonya kami belum bisa sampaikan. Kita lihat pada waktunya,” jelas Isyana usai acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 September 2023.

Dia menyatakan, hingga saat ini, Ketua Umum PSI adalah Giring Ganesha. Di samping itu, Isyana juga mengaku belum bisa memberi kepastian Kaesang akan bergabung ke PSI. Isyana hanya meminta doa agar semua berjalan dengan baik.

Isyana juga membantah PSI sekadar gimik. Dia memastikan akan ada pengumuman sosok yang akan bergabung ke PSI pada waktunya. “Sebetulnya bukan fokus ke gimik atau bukan, tapi sebenarnya siapa sosoknya. Siapa sosoknya nanti akan terbuka pada waktunya. Clue-nya? Mawar,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi men-

gungkapkan, Kaesang sudah meminta restu kepadanya untuk bergabung dengan PSI. “Biasa di keluarga minta doa restu, karena saya bilang tidak pun, akan tetap jalan. Soalnya anak saya memang seperti itu kalau mau tahu,” ungkap Jokowi usai groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023.

Meski demikian, Jokowi mempercayakan setiap keputusan yang diambil oleh putra bungsunya itu. Apalagi, menurutnya, Kaesang sudah berkeluarga dan bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri.

“Saya sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri harus mandiri dan tanggung jawab apa yang diputuskan, sudah pasti menjadi tanggung jawab,” katanya.

Sementara, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, menyatakan belum ada penjelasan apa-apa dari adiknya kepada keluarga soal bergabung ke PSI. Sehingga, keluarga juga tidak tahu apakah Mawar yang dimaksud dalam video unggahan PSI di medsos tersebut benar Kaesang atau bukan.

“Semalam sama Bapak (Presiden Jokowi) juga nggak ngobrolin itu. Kita enggak tahu Mawar itu siapa. Apa hubungannya dengan pihak keluarga. Memangnya itu adik saya.

Ya tanya Mawar dong.

Tanya
PSI ya,
aku

enggak mudeng, kan saya kader PDIP bukan PSI,” kata Gibran.

Gibran tak yakin jika rekaman suara dan siluet yang diunggah di akun media sosial PSI pada Rabu, 20 September 2023, adalah Kaesang.

“Kalau saya sih belum yakin (Kaesang).

Mukanya kan tidak terpampang jelas. Kalau cuma suara dan siluet kan bisa siapa saja,” ujarnya.

Ia pun menambahkan jika suara yang diputar dalam postingan di medsos tersebut bukan suara Kaesang yang menurutnya memiliki jenis suara bass.

“(Suara Kaesang) mosok sih. Nggak ah. Memangnya suara Kaesang seperti itu. Kalau saya lihat di video pendeknya itu, suaranya apa ya lebih ke tenor ya, apa soprano bukan nge-bass, bukan Kaesang,” ucapnya.

Meski Gibran menyatakan tidak yakin suara dan gambar yang mengaku sebagai Mawar dalam unggahan video PSI di sejumlah media sosial adalah adik bungsunya, tetapi PSI Solo justru menyatakan hal seba-

liknya.

Ketua PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo, menegaskan jika sosok Mawar dalam video tersebut memang benar Kaesang dan unggahan tersebut sekaligus memastikan bahwa suami Erina Gudono tersebut memang telah resmi masuk PSI.

“Kami dapat kabar bergabungnya Mas Kaesang sejak Rabu (20/9/2023) malam. Dan pastinya kabar tersebut bak durian runtuh bagi PSI, apalagi di tahun politik seperti saat ini,” ujarnya.

Selain launching melalui media sosial, moment bergabungnya Kaesang ke PSI juga akan ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) oleh pengurus DPP. Adapun berdasarkan domisili, Kaesang akan menjadi anggota PSI Jakarta Selatan.

Dengan bergabungnya Kaesang ke PSI, Yogo berharap hal tersebut akan menjadi angin segar bagi partai yang dikenal identik dengan anak muda tersebut. Ia mengakui keputusan tersebut merupakan kejutan tersendiri bagi internal partai.

“Mas Kaesang dengan segala popularitas yang dimiliki pastinya bisa memilih partai politik yang lebih besar dibandingkan PSI yang notabene masih partai baru yang diisi anak-anak muda. Namun, Mas Kaesang justru tertarik bergabung dengan kami, ini pastinya hal yang sangat menggembirakan,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menyebut, ada aturan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama. Dia menilai keluarga Jokowi telah mengabaikan aturan AD/ART PDIP yang ada di nomor 25a.

Khoirul menyebut, karena aturan itu, PDIP telah mencopot Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail yang juga gubernur Maluku karena istrinya mencalonkan diri sebagai kader PAN.

Karena itu, jika PDIP konsisten pada aturan AD/ART Nomor 25a tersebut, itu berpeluang memunculkan koreksi total PDIP terhadap status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDIP, bahkan posisi Presiden Jokowi. Sebab, jika tidak menegakkan aturan itu, PDIP bisa dituding tebang pilih dan pilih kasih dalam menjalankan aturan.

Selain itu, dia menilai langkah Kaesang ini juga bisa berimbas pada terdegradasinya dukungan PDIP di Jawa Tengah yang masyarakatnya masih merasa dekat dengan figur Jokowi daripada identitas kepartaian PDIP.

“Jika hal itu terjadi, maka untuk kesekian kalinya PDIP akan kembali menuding PSI sebagai partai politik baru yang cukup efektif menggerogoti basis pemilih loyal PDIP di sejumlah dapil di penjurusan nusantara,” ujar Khoirul dalam keterangannya, Kamis, 21 September 2023. ●RDO



“Saya kira agenda perubahan yang selalu digaungkan demokrat wasallam”

Adi Prayitno



Demokrat Gabung Prabowo

JARGON PERUBAHAN SUDAH TAMAT

Partai Demokrat telah meresmikan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Narasi besar tentang perubahan yang getol digaungkan ketika masih menyokong Anies Baswedan, kini berbalik. Partai berlambang bintang mercy itu perlahan mulai menarasikan tentang pentingnya kesinambungan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengklaim, gagasan kesinambungan bukan kali pertama ini ia sodorkan. Dalam pidatonya, AHY mengatakan, Demokrat percaya Prabowo mampu menghadirkan kesinambungan dari keberhasilan pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo. “Ini adalah makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan. Terlebih ketika berbicara tentang kerangka dasar bernegara, kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar AHY di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis malam, 21 September 2023. Harapan kedua dari Partai Demokrat adalah memperbaiki dan mengubah segala kebijakan yang dinilai belum baik. Itulah gagasan perubahan yang selalu digaungkan Demokrat.

“Inilah esensi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan, tapi saya optimis, mengapa? Karena Pak Prabowo mengatakan konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri,” ujar AHY.

“Dua harapan yang kami titipkan kepada Bapak, kami yakin di

bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia maju di masa depan bisa kita wujudkan bersama,” sambung putra sulung SBY itu.

AHY juga menjabarkan sejumlah alasan lebih memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan kubu pendukung Ganjar Pranowo.

“Kami melihat bahwa semangat yang tadi kami titipkan adanya keberlanjutan dan kesinambungan, tapi juga ada perubahan dan perbaikan. Itu kami yakini bisa dijalankan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, kelak Insya Allah terpilih menjadi pemimpin kita ke depan,” ujar AHY.

Partai Demokrat juga terkesan dengan semangat dan visi kepemimpinan yang ditawarkan oleh Prabowo. Apalagi, Menteri Pertahanan itu menjadi pihak yang membuka ruang sinergi dan kerja sama yang sangat baik.

Di samping itu, Partai Demokrat menilai pentingnya kebersamaan dan rasa saling percaya dalam membangun sebuah kerja sama. Sebab dalam satu koalisi, dibutuhkan peran saling menguatkan antarpolisi politik.

“Ini penting karena bukan hanya kita berharap memberikan tiket. Tiket itu adalah satu hal dalam sebuah pencapresan, tapi yang paling penting adalah peran kita,” ujar AHY.

“Dalam arti, bisakah kita semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini memberikan kontribusi peran yang nyata, baik selama kampanye nanti, selama kemenangan, maupun Insya Allah jika terpilih menjadi presiden beliau membentuk pemerintahan yang juga menghadirkan kesinambungan,” ujarnya menambahkan.

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, me-

nilai, sikap Partai Demokrat yang akhirnya memilih Prabowo dinilai lebih tepat dibandingkan mendukung Ganjar Pranowo.

Khairul menilai, berdasarkan data survei pasca-berpisahnya Partai Demokrat dari gerbong pencapresan Anies Baswedan, basis pemilih loyal Demokrat lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo.

“Hal itu menjadi bekal yang baik bagi Demokrat jika sewaktu-waktu memutar haluan dukungannya ke Prabowo, sehingga lebih minim guncangan dan turbulensi dalam mengarahkan pendukungnya,” ujar Khoirul.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Khoirul, sejumlah elite Partai Demokrat menyampaikan preferensi arah dukungan kepada pencapresan Ganjar Pranowo, tetapi hari ini akhirnya diputuskan mendukung Menteri Pertahanan tersebut.

Menurutnya, gagalnya arah dukungan Demokrat karena masih buntunya komunikasi dua arah antara PDIP dan Partai Demokrat. Dia menilai Demokrat tampak kerepotan mengakses komunikasi langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menjadi veto player sekaligus penentu arah gerbong koalisi Ganjar.

“Konon ada barikade kuat di lingkaran Megawati yang membuat komunikasi politik PDIP kurang fleksibel. Mungkin saja Megawati belum selesai dengan dirinya ketika menyikapi sejarah konflik politik masa lalu,” ujarnya.

Karena kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati. Selain itu, Demokrat juga sering menempatkan dirinya pada basis paradigma politik tengah-moderat, yang lebih deka

dengan tim Prabowo yang mengklaim spektrum tengah saat ini.

Sedangkan, PDIP sebagai pengusung utama Ganjar yang telah mengklaim diri sebagai gerbong kiri-progresif dan Anies yang lebih kuat merepresentasikan kekuatan politik Islam. “Karena itu, wajar jika Demokrat merasa tidak ada hambatan serius secara ideologis,” ujarnya.

Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai, keputusan bergabung dengan KIM membuat agenda perubahan Partai Demokrat selesai.

“Saya kira agenda perubahan yang selalu digaungkan demokrat wasallam,” kata Adi.

Dia menilai, sudah tidak mungkin lagi Partai Demokrat terus-menerus menggaungkan agenda-agenda perubahan. Apalagi, terus bersikap galak terhadap Presiden Jokowi seperti sebelumnya.

Apalagi, Adi mengingatkan, masyarakat sudah memahami kalau Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mengidentifikasi dirinya paling dekat dengan Jokowi. Terutama, untuk mendapatkan faedah elektoral.

Maka dari itu, dia merasa, akan menjadi agak lucu dan agak aneh kalau Partai Demokrat yang sudah bagian dari koalisi Prabowo yang pro Jokowi terus menerus mengkritik Jokowi. Bahkan, sikap itu akan jadi kontraproduktif.

Dalam konteks itu, dia meyakini, Partai Demokrat ke depan akan bersikap lebih tenang terhadap Presiden Jokowi. Partai Demokrat tidak akan lagi menyerang Presiden Jokowi dan tidak akan lagi khutbah tentang perubahan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia juga mengingatkan, apapun judulnya, Demokrat harus tegak lurus dengan keputusan politik koalisi Prabowo yang menyatakan menjadi bagian dari Presiden Jokowi.

“Harus sami’na wa atho’na. Oleh karena itu, jargon perubahan dari Demokrat wasallam, selesai,” ujar Adi.

Partai Demokrat juga dinilai perlu menyesuaikan narasi politik perubahan dengan semangat keberlanjutan Prabowo yang saat ini bagian dari Pemerintah. Karena itu, dalam konteks ini, Partai Demokrat juga sulit mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect dari Prabowo.

“Dalam konteks ini tentu Demokrat akan kesulitan membangun narasi, termasuk misalnya soal coattail effect, ini satu-satunya yang bisa menjamin Demokrat naik secara signifikan atau tidak ya kerja politik Demokrat, bukan mendapatkan faedah atau efek dari dukung Prabowo itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Adi mengatakan, partai yang akan mendapat elektoral dari suara Prabowo lebih besar adalah Partai Gerindra. “Jadi Demokrat itu kalau bicara Pileg ya bagaimana mereka memperkuat basisnya bukan yang lain,” ujarnya. ●RDO





“Wajar saja kalau PDI Perjuangan tidak begitu kuatir dengan koalisi besar KIM yang mendukung Prabowo Subianto karena sudah memiliki pengalaman dan berhasil menang”

Fernando Emas

PDIP SUDAH PENGALAMAN TAK GENTAR DIKEROYOK

Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Adanya deklarasi ini semakin mempertegas bahwa PDIP akan dikeroyok oleh KIM dan Koalisi Perubahan dengan tujuh partai yang ada di parlemen.

“**S**aya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2024,” kata AHY di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Bergabungnya Partai Demokrat semakin menambah kekuatan dukungan politik bagi Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda lebih dulu menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Dengan kata lain, Koalisi Indonesia Maju menjadi partai yang memiliki dukungan sangat besar jika dibandingkan dengan koalisi partai politik lainnya seperti Koalisi PDIP yang diisi Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta Koalisi Perubahan yang diisi Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PDIP sebagai pemenang pemilu dua kali berturut-turut ini pun harus dihadapkan dengan koalisi gemuk yang dibentuk Koalisi Indonesia

Maju. Jalan PDIP untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang akan mendapatkan perlawanan yang cukup berat nantinya.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan, partainya tidak gentar untuk menghadapi koalisi gemuk bentukan Prabowo Subianto. Kendati begitu, PDIP sampai saat ini menjalin komunikasi yang baik dengan Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar.

“Kami sejak awal memang dikeroyok, tapi kami itu baik dengan Golkar, PAN, apalagi Demokrat, tetap saja komunikasi terjaga. Bahkan, terakhir dengan Demokrat komunikasi sampai kemarin masih lancar, bahwa pilihan berbeda ya tadi kedaulatan setiap partai yang harus kita hormati,” ujar Said.

Dia bercerita bahwa PDIP memang kerap mendapatkan tantangan yang cukup berat yakni melawan koalisi gemuk. Hal itu pernah terjadi pada Pemilu 2014 saat PDIP mengusung Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Meski berhadapan dengan kekuatan politik cukup besar, PDIP dengan koalisi rampingnya itu tetap bisa memenangkan Pilpres kala itu. Kata dia, untuk memenangkan Pilpres 2014 butuh kerja keras antara partai pengusung.

“Tahun 2014 adalah spirit kami, terbukti dengan kerja sama parpol seiring yang ramping ternyata kami bisa memenangkan Pak Jokowi-JK, dan itu fakta,” ujar Ketua Badan

Anggaran (Banggar) DPR itu.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Rumah Politik, Fernando Emas, mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju akan membuat Prabowo Subianto semakin percaya diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

Kendati demikian, Fernando menilai dengan bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju tidak akan memberikan dampak besar. Kata Fernando, Prabowo Subianto akan tetap sulit memenangkan konstelasi Pilpres 2024.

“Namun bergabungnya Partai Demokrat mendukung Prabowo tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk memenangkan Pilpres 2024, karena tidak memiliki basis dukungan yang jelas,” kata Fernando.

Dikatakan Fernando, hal tersebut dibuktikan dari perolehan suara 2014 jauh turun dibandingkan perolehan suara 2009. Tidak hanya itu, para kader Partai Demokrat juga kecewa dengan Prabowo Subianto karena tidak menjadikan AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

“Membuat dukungan kader dan pe-

milih Partai Demokrat tidak akan maksimal memilih Prabowo Subianto,” jelas Fernando.

Pada Pilpres 2019, PDIP yang mengusung Joko Widodo berkoalisi dengan PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sedangkan Prabowo Subianto diusung oleh enam partai politik yang memiliki kursi di DPR, termasuk partai penguasa saat itu yaitu Partai Demokrat.

“Sehingga wajar saja kalau PDI Perjuangan tidak begitu kuatir dengan koalisi besar KIM yang mendukung Prabowo Subianto karena sudah memiliki pengalaman dan berhasil menang,” kata Fernando.

Dia mengatakan, dengan pengalaman di Pilpres 2014 membuat PDIP akan semakin kuat untuk menghadapi Koalisi Indonesia Maju yang diusung empat partai politik di Parlemen.

“Akan lebih siap untuk menghadapi Pilpres 2024, yang didukung oleh 4 partai parlemen dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang didukung 3 partai politik pemilik kursi di DPR,” kata Fernando.

Dia menyampaikan sampai saat ini seluruh partai peserta Pemilu Serentak 2024, khususnya partai yang sudah membentuk koalisi, sedang menyusun strategi kemenangan.

“Semua partai politik akan melakukan strategi untuk memenangkan Pilpres 2024, termasuk ketika akan menentukan siapa cawapres yang dipilih.

Termasuk PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum menetapkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo,” kata Fernando.

Lambannya Koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Maju dalam menentukan cawapres, kata dia, tampaknya memang sudah direncanakan. Melihat hal ini, Fernando menilai, ada kemungkinan bahwa kedua koalisi tersebut bersatu.

“Saya melihat masih ada peluang mendukung Ganjar dengan Prabowo untuk memperbesar peluang kemenangan,” kata Fernando.

Kendati begitu, peluang keduanya untuk bersatu memang cukup sulit. Di sisi lain, kata dia, gestur Jokowi terlihat memang sedang berupaya untuk menjodohkan Ganjar dengan Prabowo Subianto.

“Walaupun peluangnya sangat kecil. Namun, sampai saat ini masih ada upaya untuk memasangkan Ganjar dengan Prabowo, termasuk upaya tersebut sedang diupayakan oleh Jokowi,” tandas Fernando. •RDO



“Memang ini juga kemenangan telak. Tapi selisih kemenangannya di bawah 40 persen. Sementara, jika Prabowo yang capres, kemenangannya selisih di atas 40 persen”

Denny JA



PRABOWO-GANJAR BERSATU MUDAH KALAHKAN AMIN

Wacana memasang Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo kembali mencuat sebelum jelang pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika duet ini bisa diwujudkan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan lebih mudah dikalahkan di Pilpres 2024.

Berdasarkan survei LSI Denny JA, September 2023, Prabowo dan Ganjar bakal memperoleh dukungan 64,9 persen. Sementara, Anies dan Muhaimin hanya mendapatkan 16,6 persen suara. Artinya, kemenangan Prabowo dan Ganjar sangat telak atas duet Amin dengan selisih di atas 40 persen.

Menurut Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, jika hal itu terjadi, maka akan menjadi kemenangan tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia.

Denny mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menang besar di Pilpres 2004 dan 2009, namun kemenangannya di bawah 61 persen. Sementara, Prabowo yang berpasangan dengan Ganjar bisa meraih kemenangan di atas 62 persen.

Apabila posisinya dibalik, Ganjar sebagai capres dan Prabowo cawapres, pasangan ini juga tetap menang, namun di angka 60 persen. Sementara, Anies-Cak Imin memperoleh 20,6 persen.

“Memang ini juga kemenangan telak. Tapi selisih kemenangannya di bawah 40 persen. Sementara, jika Prabowo yang capres, kemenangannya selisih di atas 40 persen,” tegas Denny.

Namun, yang menjadi pertanyaan, mungkinkah Ganjar bersedia mengalahkan menjadi cawapres Prabowo? Menurut Denny, jika kalkulasinya rasional, hal itu mungkin saja terjadi. Apalagi, kemenangan Prabowo sebagai capres jauh lebih telak ketimbang kemenangan Ganjar sebagai capres.

Denny menambahkan, Pilpres adalah peristiwa politik. Kalkulasinya adalah kalkulasi politik yang berbeda cara menghitungnya. PDIP yang merupakan par-

tai dengan suara terbesar pasti tak ikhlas jika kadernya hanya menjadi cawapres. Apalagi, jika PDIP yakin Ganjar akan mengalahkan Prabowo di putaran kedua. Meski begitu, sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup, segala hal masih mungkin terjadi.

“Ada pameo terkenal di dunia politik: kecuali mengubah lelaki menjadi perempuan dan mengubah perempuan menjadi laki-laki, politik praktis bisa mengubah apapun. Itu juga termasuk bisa mengubah siapa pun yang akhirnya menjadi capres dan cawapres,” ujarnya.

Terkait potensi tersebut, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pun memberikan sinyal positif bersama di Pilpres 2024. Prabowo tak menolak secara terang-terangan soal kans duet dirinya dengan Ganjar dan hanya menyinggung soal kerukunan.

“Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan,” kata Prabowo usai acara Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Kamis malam, 21 September 2023.

Prabowo berharap kondisi apapun yang terjadi, termasuk konstelasi politik, bisa dihadapi dengan rukun dan damai. “Kita harus sejuk,” kata Menteri Pertahanan itu.

Ia juga mengatakan bahwa hal ini pun berlaku pada siapa saja yang nantinya diberikan mandat kepercayaan oleh rakyat. “Siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ganjar. Dia mengaku tidak memiliki jarak dengan Prabowo walaupun berbeda kubu terkait Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ganjar usai ditanya awak media mengenai al-

sannya meng-

gunjungi

markas

relawan

pen-

dukungnya bernama “Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR)” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 September 2023.

Lokasi markas relawan Ganjar itu sangat dekat dengan markas relawan Prabowo bernama Rumah Pemenangan 2024 Prabowo Presiden di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Jaraknya hanya berkisar sekitar 50 meter.

“Semua calon yang punya potensi berpasangan dengan saya, sama jaraknya,” kata Ganjar saat ditemui di Graha Pena 98, Menteng, Kamis malam.

Sebelumnya, Ganjar juga telah membuka kemungkinan peluang berduet dengan Prabowo di Pilpres 2024. “Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,” ujar Ganjar.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai duet Prabowo-Ganjar bisa terjadi. Sebab, gabungan parpol pendukung Ganjar dan Prabowo telah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

“Gabungan PDIP-Gerindra lebih dari 20 persen. Kalau keduanya gabung, ya secara teknis UU berkaitan jumlah kursi, sudah jauh lebih besar,” jelas Qodari, Kamis, 21 September 2023.

Kemudian dari jumlah pemilih, keduanya juga kuat. Artinya jika Ganjar dan Prabowo dijodohkan, sulit ada tandangnya. “Berdasarkan survei hari ini, Ganjar dan Prabowo kan kejar-kejaran di nomor 1 dan 2. Jadi bayangkan kalau nomor 1 dan 2 gabung, tentu suaranya akan sangat-sangat besar,” sambungnya.

Selain itu, faktor yang menyebabkan keduanya bisa berduet lantaran sepakat akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi. “Karena ketiga capres yang ada, temanya keberlanjutan.

Hanya siapa yang dianggap lebih berani atau mewakili keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi secara paradigma keduanya bisa bertemu,” terang dia.

Terkait siapa yang lebih layak menjadi capres dan Cawapres, Qodari menyebut jawabannya ada di tangan Megawati. Apakah M e g a ber-

sedia menurunkan standar Ganjar dari capres menjadi cawapres.

“Bolanya di Ganjar dan Mega. Mau nggak jadi cawapres Prabowo,” ujar Qodari.

Menurut Qodari, sulit menggeser posisi Prabowo dari capres menjadi cawapres. Sebab, berdasarkan hasil survei hari-hari ini, Prabowo selalu unggul dari Ganjar. “Lawan Jokowi saja di Pilpres 2014 dan 2019 yang jelas selisih suaranya jauh, dia berani. Apalagi sekarang yang peluang menangnya lebih besar,” terangnya.

Disukai Ormas

LSI Denny JA juga merilis survei tingkat popularitas dan kesukaan ormas Islam terhadap Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Dalam survei yang dilakukan pada 1-8 Agustus 2023, dari total responden kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori ormas. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi mayoritas dengan 56,9 persen. Lalu, Muhammadiyah 5,7 persen, ormas lain 3 persen, non-ormas Islam 33,8 persen, dan tidak tahu 0,6 persen.

Dari klasifikasi tersebut, Prabowo menjadi capres yang paling dikenal di semua ormas Islam. Hampir 100 persen responden di semua ormas mengetahui Prabowo.

“Pengenalan Prabowo di NU sebesar 98 persen. Anies sebesar 87,4 persen. Ganjar sebesar 85,9 persen. Di Muhammadiyah, pengenalan Prabowo bahkan mencapai 100 persen. Pengenalan Ganjar dan Anies di level yang sama sebesar 92,5 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Selasa, 19 September 2023.

Sementara di tingkat kesukaan, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di NU. Di Muhammadiyah, tingkat kesukaan Prabowo paling tinggi. Sementara di ormas lain, Prabowo dan Anies bersaing ketat.

“Tingkat kesukaan Prabowo sebesar 79,4 persen. Tingkat kesukaan Ganjar sebesar 79,2 persen. Adapun tingkat kesukaan terhadap Anies sebesar 72,6 persen. Di Muhammadiyah, tingkat kesukaan Prabowo paling tinggi sebesar 65,0 persen. Ganjar dan Anies di level tingkat kesukaan yang sama sebesar 62,2 persen. Di ormas Islam lainnya, Prabowo dan Anies bersaing ketat dalam level yang sama sebesar 95,2 persen. Kesukaan terhadap Ganjar di ormas lainnya sebesar 89,5 persen,” kata Ardian.

LSI Denny JA juga meminta responden untuk memilih ketiga capres. Hasilnya Prabowo unggul di responden NU dengan suara 36,2 persen. Beda tipis dengan Ganjar yang berada di angka 35,5 persen. Sedangkan, 17,9 persen memilih Anies.

Sementara di responden Muhammadiyah, Anies paling banyak dipilih dengan suara 45,2 persen. Disusul Ganjar 33,0 persen dan Prabowo berada di urutan terakhir dengan 20,8 persen. Pada kategori ormas lain, Prabowo unggul di angka 29,8 persen, Anies 19,9 persen, dan Ganjar 14,5 persen.

• RDO

